



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2024



Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30911
www.pn-pangkalanbalai.go.id



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pereviu II

Eunike Mayerni Batubara

Pangkalan Balai, 2 Februari 2025

Pereviu I

Muhammad Iman Septian

CHEKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Tujuan/sasaran dalam LKj telah	✓ ✓ ✓

		sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		5. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		6. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		7. IKU dan IK telah SMART	✓

Pangkalan Balai, 2 Februari 2025

Pereviu II



Eunike Mayerni Batubara

Pereviu I



Muhammad Iman Septian

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah selesai disusun. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kepada berbagai pihak, *stakeholder* dan masyarakat yang berkepentingan terhadap Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Pangkalan Balai Tahun 2024 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Pangkalan Balai Tahun 2024 ini diharapkan dapat sebagai masukan baik itu kepada Pimpinan atau lainnya guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Pangkalan Balai kedepannya sehingga juga kedepannya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat terus melanjutkan cita-cita Mahkamah Agung RI menuju peradilan yang agung.

Pangkalan Balai, 2 Februari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN
BALAI**



FITRI AGUSTINA, S.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang dilaksanakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024, Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terus berupaya untuk menyajikan laporan yang akuntabilitas, karena dengan mewujudkan LKJIP yang proporsional dan professional akan semakin transparan dalam mempertanggung jawabkan kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Dengan berakhirnya Periode 2024, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berupaya menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim penyusun LKjIP. Data kinerja yang menjadi acuan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2024 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan

dapat menjadi bahan perbaikan untuk berikutnya. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

**“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG
AGUNG”**

**TABEL CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI TAHUN 2024**

Tabel 1. 1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	94	85	90.43
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	99	99
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5	4	80
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	95	89	93.68

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	N/A	N/A
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	90	N/A	N/A
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	100	100
		a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	100	100
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	100	100
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15	13	86.67
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	45	25	55
RATA-RATA CAPAIAN				90,47	

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisa capaian data di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam laporan ini.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	iii
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	iii
TAHUN 2024	iii
CHEKLIST REVIU	iv
KATA PENGANTAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi	5
1.2.1. Tugas	5
1.2.2. Fungsi	5
1.3. Struktur Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	22
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	22
2.1.1. Visi Dan Misi	22
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	23
2.1.3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	25
2.1.4. Program Utama Dan Kegiatan Pokok	34
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024	35
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	40
3.1.1. Analisis Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	50

3.1.2. Analisis Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	53
3.1.3. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	55
3.1.4. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	58
3.1.5. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	59
3.1.6. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	61
3.1.7. Index Kepuasan Pencari Keadilan	64
3.1.8. Analisis Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	69
3.1.9. Analisis Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	72
3.1.10. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	74
3.1.11. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	77
3.1.12. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	81
3.1.13. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	83
3.1.14. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	85
3.1.15. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	87
3.2. Realisasi Anggaran	88
BAB IV PENUTUP	91
4.1. Kesimpulan	91
4.2. Rekomendasi	92
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024	ix
Tabel 2. 1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	25
Tabel 2. 2. Anggaran Tahun 2024	35
Tabel 2. 3. Tabel Reviu Rencana Kinerja Tahun 2024	35
Tabel 2. 4. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024	38
Tabel 3. 1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	41
Tabel 3. 2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d. 2024	42
Tabel 3. 3. Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2024	45
Tabel 3. 4. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2020-2024	46
Tabel 3. 5. Keadaan Perkara Tahun 2020 s.d. 2024	49
Tabel 3. 6. Rekapitulasi Perkara Perdata Tahun 2024	51
Tabel 3. 7. Perbandingan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	52
Tabel 3. 8. Rekapitulasi Perkara Pidana Tahun 2024	53
Tabel 3. 9. Perbandingan Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun	54
Tabel 3. 10. Rekapitulasi Perkara Yang Diselesaikan Melalui Restoratif Tahun 2024	56
Tabel 3. 11. Perkara Pidana Berhasil Restoratif Tahun 2023	56
Tabel 3. 12. Perbandingan Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	57
Tabel 3. 13. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024	58
Tabel 3. 14. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun	58
Tabel 3. 15. Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	59
Tabel 3. 16. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60
Tabel 3. 17. Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2024	63
Tabel 3. 18. Perbandingan Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	63
Tabel 3. 19. Nilai Interval Konversi	66
Tabel 3. 20. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	66
Tabel 3. 21. Perbandingan Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	67
Tabel 3. 22. Capaian Sasaran Strategis II Tahun 2024	68
Tabel 3. 23. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis II Tahun 2020-2024	69
Tabel 3. 24. Rekapitulasi Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2024	70
Tabel 3. 25. Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	71
Tabel 3. 26. Rekapitulasi Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2024	72

Tabel 3. 27. Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	73
Tabel 3. 28. Rekapitulasi Perkara yang Berhasil Mediasi tahun 2024	74
Tabel 3. 29. Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	75
Tabel 3. 30. Capaian Sasaran Strategis III tahun 2023	76
Tabel 3. 31. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis III Tahun 2020-2023	77
Tabel 3. 32. Capain Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2024	78
Tabel 3. 33 Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	79
Tabel 3. 34. Capaian Sasaran Strategis IV Tahun 2024	80
Tabel 3. 35. Perbandigan Capaian Sasaran Strategis IV Tahun 2020-2024	81
Tabel 3. 36. Rekapitulasi Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	81
Tabel 3. 37. Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	82
Tabel 3. 38. Tingkat Efektifitas Anggaran DIPA 01 Tahun 2024	85
Tabel 3. 39. Tingkat Efektifitas Anggaran DIPA 03 Tahun 2024	86
Tabel 3. 40. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial	86
Tabel 3. 41. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial	87
Tabel 3. 42. Pagu dan Realisasi Belanja DIPA 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	89
Tabel 3. 43. Pagu dan Realisasi Belanja DIPA 03	90

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1. Perbandingan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 sd 2024	53
Grafik 3. 2. Perbandingan Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 sd 2024	55
Grafik 3. 3. Perbandingan Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2020-2024	57
Grafik 3. 4. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2024	59
Grafik 3. 5. Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024	61
Grafik 3. 6. Perbandingan Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	64
Grafik 3. 7. Perbandingan Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 sd 2024	67
Grafik 3. 8. Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	71
Grafik 3. 9. Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	74
Grafik 3. 10. Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	76
Grafik 3. 11. Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020 sd 2024	80
Grafik 3. 12. Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Administrasi Banyuasin	3
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahunan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama periode 2024 juga tidak lepas menghadapi beberapa kendala baik teknis maupun non-teknis antara lain:

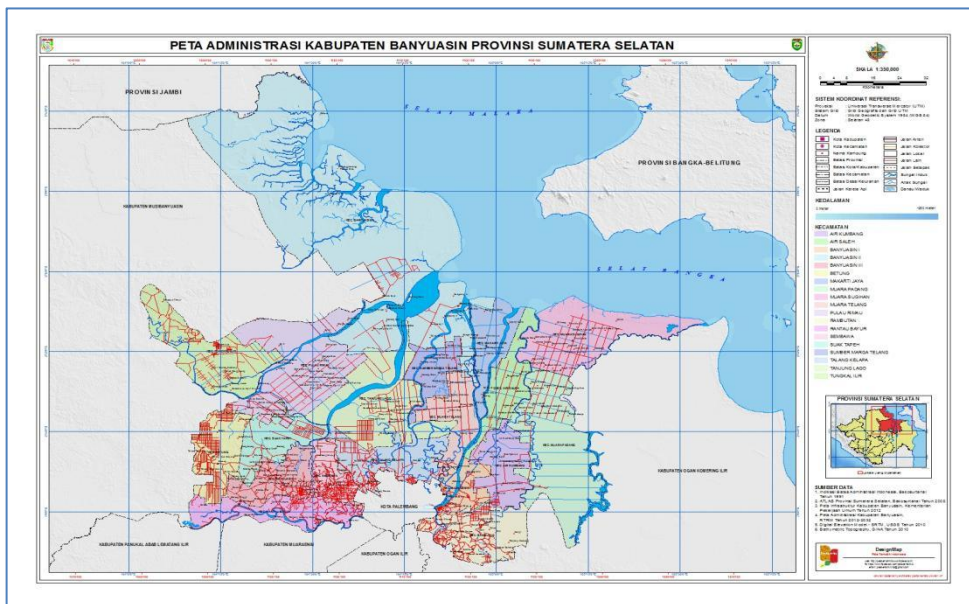
1. Masih kurangnya jumlah hakim dan panitera pengganti, yang mana ditambah dengan jadwal persidangan yang padat, otomatis menghambat dalam waktu penyelesaian persidangan atau perkara.
2. Kurangnya ASN golongan II terutama untuk ditempatkan sebagai operator dan petugas register.
3. Kurangnya anggaran baik dipa dari Badan urusan Administrasi (DIPA 01) maupun dari Badan Peradilan Umum (DIPA 03) guna menunjang operasional. Hal tersebut seringkali mengharuskan satuan kerja untuk merevisi anggaran baik

tersebut antar komponen maupun antar satker dan juga mengajukan Anggaran Tambahan Belanja (ABT) untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.

4. Masih minimnya pelatihan baik untuk struktural maupun fungsional bagi aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai guna meningkatkan kemampuan.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI merupakan salah satu pilar tegaknya suatu negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah hukum Kabupaten Banyuasin secara *Organisatoris, Administratif Dan Financial*.

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatra Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 2002. Nama kabupaten ini berasal dari nama Sungai Banyuasin, yang melintasi wilayah kabupaten ini dan Kabupaten Musi Banyuasin. Banyuasin sendiri berasal dari istilah bahasa Jawa *banyu* (air) dan *asin*, merujuk pada kualitas air sungai tersebut yang asin rasanya, terutama ke arah menuju perairan pantai.



Gambar 1. 1 Peta Wilayah Administrasi Banyuasin

Luas Kabupaten Banyuasin 11.875 km² di mana terdapat beberapa suku yang menetap di kabupaten ini, antara lain Jawa, Madura, Bugis, Bali dan Penduduk asli Melayu Banyuasin (Melayu Pesisir). Batas Wilayah banyuasin mengelilingi 2/3 wilayah kota Palembang, sehingga banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga ibu kota provinsi sumatera selatan. Kabupaten Banyuasin memiliki 21 kecamatan, 16 kelurahan dan 288 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatra Selatan). Pada tahun 2022, jumlah penduduknya sebesar 878.154 jiwa dengan luas wilayahnya 11.832,99 km² dan sebaran penduduk 68 jiwa/km².

Dengan wilayah hukum yang cukup besar, sebagai satuan kerja pemerintahan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentulah memiliki tanggung jawab mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam

menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas- asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan

sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

1.2. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi

1.2.1. Tugas

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Palembang yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

1.2.2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara lain:

- a. **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut Teknis Yudisial, Administrasi Peradilan, maupun Administrasi Umum/ Perlengkapan, Keuangan, dan Kepegawaian.
- c. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- f. **Fungsi Lainnya**: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011**

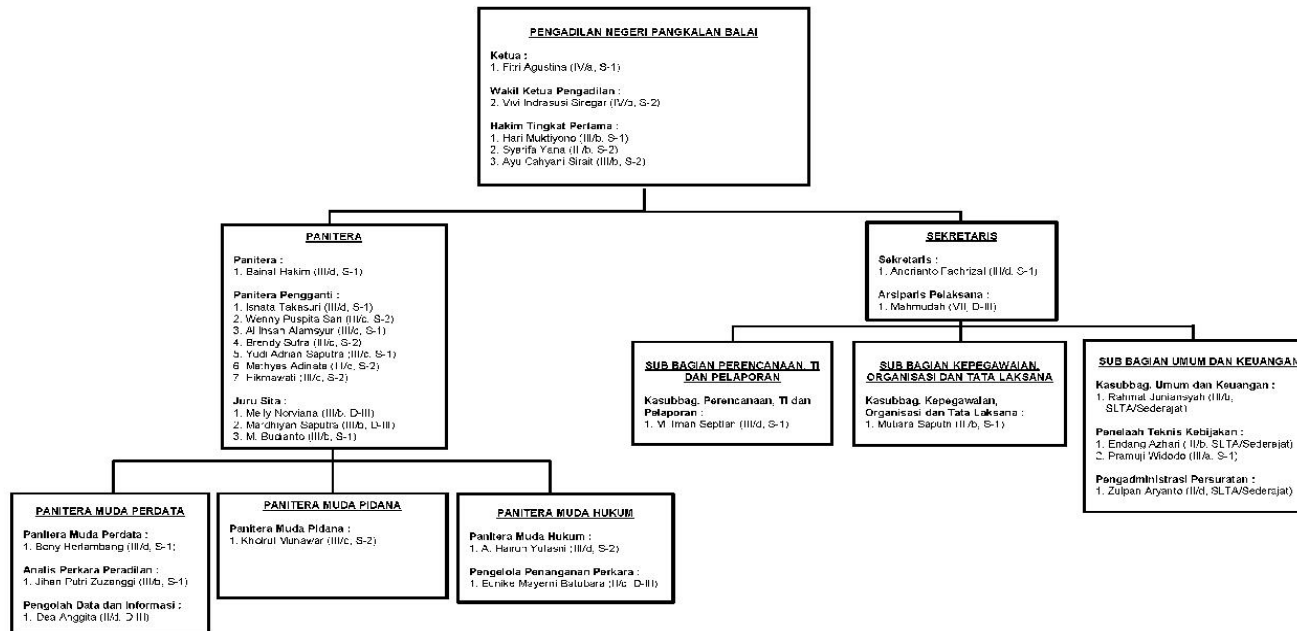
tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur organisasi Pengadilan Negeri. Bagan Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

PETA JABATAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TAHUN 2024



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi struktur organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut :

1. KETUA PENGADILAN NEGERI

- a. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar.
- b. Membuat:
 1. Perencanaan (*planning, programming*) dan perorganisasian (*organizing*).
 2. Pelaksanaan (*implementation dan executing*)
 3. Pengawas (*evaluation dan controlling*) yang baik, serasi dan selaras.
- c. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.
- d. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat / petugas yang bersangkutan.
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin / pembangunan.
- f. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
- g. Membuat/ menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.
- h. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim.

- j. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
- k. Melakukan pengawasan intern.
 - Intern : Pejabat peradilan, keuangan dan material.
- l. Menugaskan hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu.
- m.
 - 1. Melakukan Evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
 - 2. Melaporkan evaluasi atas hasil Pengawasan dan penilaiannya Mahkamah Agung.
 - 3. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 6 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
 - 4. Mempersiapkan Kader dalam rangka menghadapi alih generasi.
- n. Melakukan pembinaan terhadap Dharmayukti Karini, IKAHI, Koperasi dan PTWP.
- o. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- p. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.

2. WAKIL KETUA

- a. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasian.
- b. Mewakili ketua bila berhalangan.
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kejadian ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

3. HAKIM

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
- c. Pengadilan Negeri melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Perasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

KEPANITERAAN

1. PANITERA

- a. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
- c. Membantu pimpinan pengadilan dalam pembinaan pegawai.
- d. Membantu hakim dalam persidangan perkara pidana dan perdata.
- e. Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda menyelenggarakan administrasi mengenai jalannya perkara pidana dan perkara perdata dan situasi keuangan perkara perdata.
- f. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- g. Membuat akta dan salinan putusan.
- h. Menerima dan mengirim berkas perkara.
- i. Melaksanakan Eksekusi putusan perkara perdata.
- j. Menyelenggarakan pendaftaran Badan Hukum Perseroan terbatas, Perseroan Commanditer dan Yayasan.
- k. Menerima dan mendatangi pendaftaran surat kuasa, melegalisasi surat-surat bukti perkara yang diajukan kepersidangan.
- l. Meneliti dan mengoreksi Konsep surat yang diajukan bawahan.

- m. Membuat dan Menandatangani Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bawahan.

2. PANITERA MUDA PIDANA

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu panitera dalam menyelenggaraan administrasi perkara dan pengolahan penyusunan laporan perkara perdata.
- c. Mengkoordinir / membagi tugas urusan perdata untuk diberikan kepada bawahan.
- d. Melaksanakan tugas administrasi perkara perdata, menerima dan memberi nomor register pada setiap perkara perdata yang diterima serta mencatatnya dalam register perdata.
- e. Menyiapkan berkas perkara banding/ kasasi untuk dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.
- f. Menyerahkan Arsip berkas perkara ke Panitera Muda Hukum.
- g. Membantu Hakim dalam persidangan perkara pidana dan perkara perdata.
- h. Meneliti mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.

3. STAF PANITERA MUDA PIDANA

- a. pemegang buku register perkara singkat.
- b. pemegang buku register perkara lalu lintas dan perkara cepat.

- c. pemegang buku register penyitaan.
- d. pemegang buku register pengeledahan.
- e. pemegang buku register praperadilan.
- f. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan.
 - 1. Laporan Keadaan perkara pidana.
 - 2. Laporan Jenis perkara pidana.
- g. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan.
 - 1. Laporan perkara banding.
 - 2. Laporan perkara kasasi.
 - 3. Laporan perkara PK.
 - 4. Laporan perkara yang terdakwa mengajukan Grasi/Remisi.
- h. Menyiapkan dan membuat laporan Semester.
 - 1. Laporan kegiatan hakim.
 - 2. Laporan pelaksanaan tugas Hakim.
- i. Kearsipan
 - 1. Berkas perkara yang masih aktif dan yang telah diminutasi.
 - 2. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana.

4. PANITERA MUDA PERDATA

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara pidana dan pengelolaan penyusunan laporan perkara pidana.

- c. Menyerahkan arsip berkas perkara ke Panitera Muda Hukum.
- d. Membantu Hakim dalam persidangan Perkara Pidana dan perkara perdata.
- e. Mengelola keuangan Perkara Pidana, Uang bantuan Hukum dan uang jaminan penangguhan penahanan.
- f. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.

5. PANITERA MUDA HUKUM

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengelolaan penyusunan laporan perkara.
- c. Menerima dan mengarsipkan berkas perkara yang sudah non aktif.
- d. Membantu Hakim dalam persidangan perkara pidana dan perkara perdata.
- e. Melakukan pendaftaran Badan Hukum berupa PT, CV, Firma dan Yayasan serta badan hukum lainnya.
- f. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.

6. STAF PANITERA MUDA HUKUM

- a. Menyelenggarakan pendaftaran badan-badan hukum PT,CV, Firma, dan Yayasan.
- b. Mendata dan menyusun arsip berkas perkara pidana

dan perdata.

- c. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- d. Mengelola dan menyajikan data/dokumentasi Pengadilan.

7. PANITERA PENGGANTI

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

8. JURUSITA

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua pengadilan, Ketua Sidang Dan Panitera dalam hal perkara perdata.
- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah.
- d. Membuat berita Acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang berkenaan dengan kejurusitaan.

KESEKRETARIATAN

1. SEKRETARIS

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Mengatur pembagian tugas pejabat Kesekretariatan.
- c. Membantu pimpinan pengadilan dalam pembinaan pegawai.
- d. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Mengkoordinir para Kepala Sub. Bagian serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan.
- e. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung Jawab atas pengelolaan dan penggunaan anggaran.
- f. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).
- g. Meneliti dan mengoreksi Konsep surat yang diajukan bawahan.
- h. Membuat dan Menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bawahan.

2. KASUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

- a. Membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang.pelaksanaannya serta pengorganisasian.
- b. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Keuangan.
- c. Membagi tugas urusan keuangan untuk diberikan kepada para staf.
- d. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan peralatan kantor/langganan daya dan jasa untuk mendapatkan

penyelesaian.

- e. Menyusun konsep surat tanggapan yang berkaitan dengan anggaran rutin dalam rangka meminta data keuangan.
- f. Meneliti kelengkapan dan kebenaran SPP.
- g. Menelitian kelengkapan dan kebenaran register penutupan KAS.
- h. Meneliti SPJ penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti pengeluaran.
- i. Menyelesaikan surat-surat yang berkenaan dengan pinjaman untuk ditandatangani oleh ketua Pengadilan Negeri.
- j. Menyelesaikan administrasi Bantuan Hukum bagi mereka yang tidak mampu.
- k. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Umum.
- l. Membagi tugas urusan Umum untuk diberikan kepada para staf.
- m. Mengkoordinir surat masuk dan surat keluar.
- n. Membuat daftar Inventaris Ruangan.
- o. Menyelenggarakan kearsipan surat.
- p. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.
- q. Menyelenggarakan pemeliharaan alat, perlengkapan kantor, gedung dan rumah dinas.
- r. Membuat dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bawahan.

3. STAF KASUB KEUANGAN (BENDAHARA)

- a. Melaksanakan tugas perbedaharaan bersumber dari

pelaksanaan APBN.

- b. Mengajukan SPP Pembayaran langsung, SPP Penyediaan Dana UYHD (SPP-DU), SPP Penggantian Dana UYHD (SPP-DU) dan SPP Tambahan UYHD (SPP-TU).
- c. Mengadakan pembukuan atas pengeluaran dana UYHD kedalam buku kas umum Tabelaris dan Pembantu setiap MAK.
- d. Mencairkan uang sesuai SP2D yang diterima.
- e. Laporan untuk pertanggung jawaban setiap pengeluaran dana UYHD.
- f. Menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas.
- g. Melakukan pemotongan PPH atas Pengeluaran dana UYHD.

4. STAF KASUB UMUM

- a. Menerima dan membukukan surat masuk dan keluar
- b. Mengirim surat-surat dinas
- c. Menyampaikan surat masuk kebagian masing-masing.
- d. Membantu membuat daftar inventaris ruangan.
- e. Membantu membuat kartu inventaris barang.
- f. dan tugas yang diberikan kepadanya.

5. KASUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Kepegawaian.
- c. Membagi tugas urusan Kepegawaian untuk diberikan kepada para staf.

- d. Menyusun data kepegawaian untuk mengikuti ujian dinas dan diklat.
- e. Mengusulkan pemberian penghargaan tanda kehormatan.
- f. Menyusun Bezetting dan DUK.
- g. Melakukan permintaan KARPEG, KARSIS, KARSU DAN TASPEN.
- h. Menyelenggarakan sumpah PNS, pelantikan dan sumpah Jabatan.
- i. Mengusulkan Kenaikan pangkat pegawai/jabatan struktur dan fungsional.
- j. Mengusulkan dan menyelenggarakan administrasi mutasi pegawai.
- k. Mengusulkan pemberhentian dan pensiun pegawai.
- l. Menyiapkan dan menyusun laporan kepegawaian .
- m. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.
- n. Membuat dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bawahan.

6. STAF KASUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- a. Mengerjakan *Bezetting*, DUK, Surat Pernyataan menduduki jabatan.
- b. Membuat usul kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala.
- c. Mengerjakan usul permintaan Karis dan Karsu.
- d. Mengerjakan usul mutasi, Menyiapkan Penyumpahan PNS,Jabatan.
- e. Mengerjakan daftar Hadir Pegawai.
- f. Mengerjakan Surat Izin cuti Pegawai.
- g. Mengerjakan Permintaan Askes, Karpeg , Taspen.

- h. Mengerjakan usul pemberhentian Pegawai dan pensiun.
- i. Mengerjakan surat permintaan Pengujian kesehatan bagi para CPNS dan tugas lain yang diberikan kepadanya.

7. KASUB PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran.
- d. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi.
- e. Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam *website*.
- f. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur *hardware*, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya.
- g. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer.
- h. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi.
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan teknologi informasi
- j. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dikarenakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan satker baru yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran yang telah di tetapkan oleh organisasi yang dapat dijabarkan menjadi:

2.1.1. Visi Dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan–tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundan–undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang di sesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2020–2024. Visi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Agung Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

- Menciptakan kredibilitas, profesional dan transparan.
- Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan masyarakat bangsa dan negara.
- Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai

kepastian dan berkeadilan.

2. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel.
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator tersebut telah di reviu untuk mempertajam sasaran strategis.

2.1.3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Tabel 2. 1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	A. Definisi Operasional Indikator - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk Perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		E. Periode Pengambilan Data / Frekuensi Pemantauan / Pelaporan Periodik F. Treshold/Ambang Kinerja 94 %		
	b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	A. Definisi Operasional Indikator - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk Perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara pidana tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik E. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik F. Treshold/Ambang Kinerja 100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	A. Definisi Operasional Indikator • SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ. B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan restoratif justice, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik E. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik F. Threshold/Ambang Kinerja 10 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	A. Definisi Operasional Indikator • Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		D. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, maka menunjukkan putusan ditingkat pertama dapat diterima oleh semua pihak. E. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik F. Threshold/Ambang Kinerja 95 %		
	e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	A. Definisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, maka menunjukkan putusan banding dapat diterima oleh semua pihak. E. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik F. Threshold/Ambang Kinerja 85 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Persentase Perkara anak yang diselesaikan	A. Definisi Operasional Indikator Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	dengan Diversi.	- Jumlah Perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara diversi yang dinyatakan berhasil, maka menunjukkan kinerja penanganan perkara pidana anak semakin baik. E. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik F. Threshold/Ambang Kinerja 90%		Tahunan
	a. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	A. Definisi Operasional Indikator - PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 90. B. Formula perhitungan $\text{SKM Unit Pelayanan} = \frac{\text{Total Dari Nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan, maka menunjukkan kinerja semakin baik. E. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik F. Threshold/Ambang Kinerja Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 90	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	A. Definisi Operasional Indikator • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasas perkara. • Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perdata Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik. E. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik F. Treshold/Ambang Kinerja 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan putusan pidana yang	A. Definisi Operasional Indikator • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan	Panitera	Laporan Bulanan dan

	disampaikan ke para pihak tepat waktu	Petikan Putusan. - Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan perkara. - Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Pidana Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik. E. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik F. Threshold/Ambang Kinerja 100%		Laporan Tahunan
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	A. Definisi Operasional Indikator - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang di mediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh	Panitera	Laporan Tahunan

			mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil, maka menunjukkan kinerja penanganan perkara perdata semakin baik. E. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik F. Threshold/Ambang Kinerja 15 %		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	A. Definisi Operasional Indikator - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, maka menunjukkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			semakin meningkat. E. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik F. Threshold/Ambang Kinerja 100 %		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	A. Definisi Operasional Indikator - Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non excutable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. - Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Persentase Eksekusi yang Telah Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan, maka menunjukkan kinerja semakin baik. E. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik F. Threshold/Ambang Kinerja 45%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.1.4. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang sesuai tercantum di dalam DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam pelaksanaan Program tersebut adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam pelaksanaan Program tersebut adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Tabel 2. 2. Anggaran Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 3.095.749.000,-	Rp. 4.805.749.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 171.800.000,-	Rp. 171.800.000,

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memuat angka target kinerja Tahun 2024 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Dengan adanya reuiu Indikator Kinerja Utama maka Rencana Kinerja Tahun 2024 juga mengalami perubahan. Adapun Reuiu Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

● TABEL REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Tabel 2. 3. Tabel Reuiu Rencana Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	94
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	90
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100
		g. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5
2.	Peningkatan Efektivitas	a. Persentase Salinan Putusan Perkara	100

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara	100
		c. Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	
		d. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	45

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Untuk perjanjian kinerja tahun 2024 juga mengalami perubahan menyesuaikan yang telah ditetapkan. Adapun hasil rewiu Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat di lihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 2. 4. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	94
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	90
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100
		g. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan	5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
		Restoratif	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara	100
		c. Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	
		d. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	45

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward / punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi atau satuan kerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi yang di dapat dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini. Rata-rata tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut jabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	94	85	90.43
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	99	99
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5	4	80
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	95	89	93.68
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	N/A	N/A
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	90	N/A	N/A
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	100	100
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	100	100
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	100	100

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15	13	86.67
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	45	25	55
RATA-RATA CAPAIAN				90,47	

Hasil capaian di dapat dari perhitungan dengan formula di bawah ini :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 secara umum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan tingkat keberhasilan rata-rata capaian **90,47 %**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil sudah sangat baik. Hasil ini akan dijadikan acuan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam mengevaluasi dan menyusun target, sasaran, dan program kerja untuk tahun yang akan datang.

Berikut Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d. 2024:

Tabel 3. 2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d. 2024

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel				
a. Persentase Perkara perdata yang diselesaikan Tepat waktu	2024	94	85	90.43
	2023	95	93,75	98,68
	2022	80	98,11	122.63
	2021	85	100	117.65
	2020	80	100	125
b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat waktu	2024	100	99	99
	2023	95	102,86	108,27
	2022	90	100	111,11
	2021	90	100	111.11
	2020	85	100	118
c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2024	5	4	80
	2023	100	100	100
	2022	10	100	1000
	2021	N/A	N/A	N/A
	2020	N/A	N/A	N/A
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	2024	95	89	93.68
	2023	85	88,35	104
	2022	95	91,36	96,17
	2021	93	94.01	101.09
	2020	93	96.40	100.43
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2024	85	N/A	N/A
	2023	85	92,92	109
	2022	95	95,55	100,58
	2021	98	95.89	97.85
	2020	98	103.11	105.21
f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	2024	90	N/A	N/A
	2023	100	100	100
	2022	10	N/A	N/A

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	2021	1	13.64	13.64
	2020	1	19.35	1935
g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	2024	100	100	100
	2023	90	97,74	108,6
	2022	90	99,59	110,65
	2021	85	91.17	107.26
	2020	85	84.35	105.55
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2024	100	100	100
	2023	100	100	100
	2022	100	100	100
	2021	75	100	133.33
	2020	100	57.14	57.14
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2024	100	100	100
	2023	100	100	100
	2022	100	100	100
	2021	100	100	100
	2020	100	66.67	66.67
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2024	15	13	86.67
	2023	5	5	100
	2022	10	N/A	N/A
	2021	20	3.03	15.15
	2020	10	N/A	N/A
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2024	100	100	100
	2023	100	100	100
	2022	100	100	100
	2021	100	100	100
	2020	100	100	100

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	2024	45	25	55
	2023	100	100	100
	2022	0	0	0
	2021	15	0	0
	2020	10	0	0

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2024 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel

Besar target yang ditetapkan pada sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Berikut tabel dan grafik capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel tahun 2024:

Tabel 3. 3. Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS I
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel

Indikator Kinerja		Capaian (%)
a.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90.43
b.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99
c.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	88
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	93.68
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	N/A
f.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	N/A
g.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I		92,62

Tabel 3. 4. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan & Akuntabel		
Indikator Kinerja	Tahun	Capaian (%)
a. Persentase Perkara perdata yang diselesaikan Tepat waktu	2024	90.43
	2023	98,68
	2022	122.63
	2021	117.65
	2020	125
b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat waktu	2024	99
	2023	108,27
	2022	111,11
	2021	111.11
	2020	118
c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2024	80
	2023	100
	2022	1000
	2021	N/A

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan & Akuntabel		
Indikator Kinerja	Tahun	Capaian (%)
	2020	N/A
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	2024	93.68
	2023	104
	2022	96,17
	2021	101.09
	2020	100.43
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2024	N/A
	2023	109
	2022	100,58
	2021	97.85
	2020	105.21
f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	2024	N/A
	2023	100
	2022	0
	2021	13.64
	2020	1935
g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	2024	100
	2023	108,6
	2022	110,65
	2021	107.26
	2020	105.55

Sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan mengukur sisa perkara yang diselesaikan, perkara yang diselesaikan tepat waktu, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dan index

responden pencari keadilan. Pada tabel 3. 5. Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2024 dapat dilihat bahwa capaian sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel tahun 2024 mendapat capaian rata-rata sebesar **92,62%**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada kategori sangat baik. Sebelum menganalisis kinerja utama terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, berikut tampilkan tabel keadaan perkara tahun 2020 sd 2024 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai:

Jenis Perkara	Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara Putus	Sisa perkara
Perdata Permohonan	2024	3	37	42	1
	2023	0	25	25	0
	2022	1	19	20	0
	2021	1	27	27	1
	2020	1	18	18	1
Perdata Gugatan	2024	15	49	51	16
	2023	12	37	33	16
	2022	14	45	46	13
	2021	22	33	41	14
	2020	10	47	35	22
Perdata Gugatan Sederhana	2024	4	58	59	2
	2023	0	22	22	0
	2022	2	2	4	0
	2021	1	31	30	2
	2020	3	19	1	1
Pidana Biasa	2024	59	415	396	78
	2023	81	383	405	59
	2022	96	441	456	81
	2021	115	502	521	96
	2020	103	578	566	115
Pidana Singkat	2024	0	1	1	0
	2023	0	0	0	0
	2022	0	5	5	0
	2021	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0
Pidana Cepat	2024	0	17	17	0
	2023	0	17	17	0

Jenis Perkara	Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara Putus	Sisa perkara
	2022	0	14	14	
	2021	0	0	0	0
	2020	0	5	5	0
Pidana Anak	2024	1	7	8	0
	2023	2	19	20	1
	2022	0	15	13	2
	2021	0	22	22	0
	2020	1	31	32	0
Praperadilan	2024	0	4	4	0
	2023	0	2	1	0
	2022	0	9	8	1
	2021	0	7	7	0
	2020	1	3	4	0
Total	2024	81	588	578	99
	2023	97	505	523	81
	2022	113	550	566	97
	2021	139	622	648	113
	2020	119	701	661	139

Tabel 3. 5. Keadaan Perkara Tahun 2020 s.d. 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara masuk pada Tahun 2020 sebanyak 701, Tahun 2021 sebanyak 622, Tahun 2022 sebanyak 550, Tahun 2023 sebanyak 505, dan Tahun 2024 Sebanyak 588.

Perbandingan Perkara pada Pengadilan Negeri Pangkalan balai dapat dilihat berdasarkan diagram berikut:

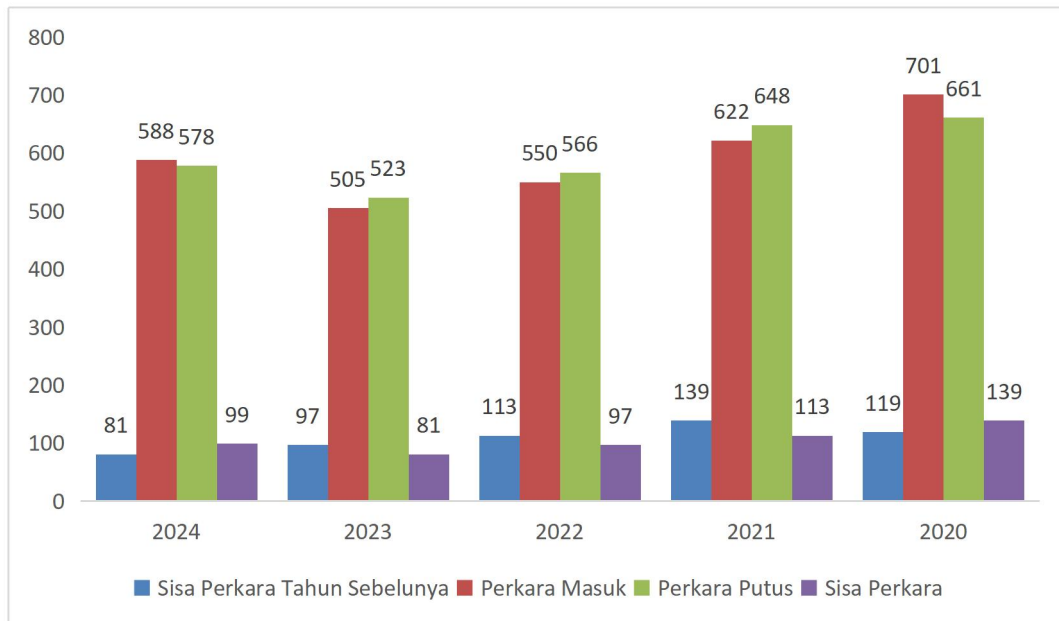


Diagram 3. 1. Perbandingan Perkara Tahun 2020 s.d. Tahun 2024

Pada tahun 2024 total perkara masuk sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) perkara terdiri dari perkara Perdata permohonan sebanyak 37 (dua puluh lima) perkara, Perdata Gugatan 49 (empat puluh sembilan) perkara, Perdata Gugatan Sederhana 58 (lima puluh delapan) perkara, Pidana Biasa 415 (empat ratus lima belas) perkara, Pidana Singkat 1 (satu), Pidana Cepat 17 (tujuh belas), Pidana Anak 7 (tujuh), dan Praperadilan sebanyak 4 (empat) perkara.

3.1.1. Analisis Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa agar penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling

lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.

3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas termasuk penyelesaian minutasi.
4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian untuk penyelesaian perkara gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, hari yang dimaksud adalah hari kerja. Berikut ini tabel persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.

Tabel 3. 6. Rekapitulasi Perkara Perdata Tahun 2024

Perkara Perdata	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perkara yang Diselesaikan
Perdata Gugatan	35	46
Perdata Gugatan Sederhana	49	59
Perdata Permohonan	39	39
Jumlah	123	144

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{123}{144} \times 100\% = \mathbf{85\%}$$

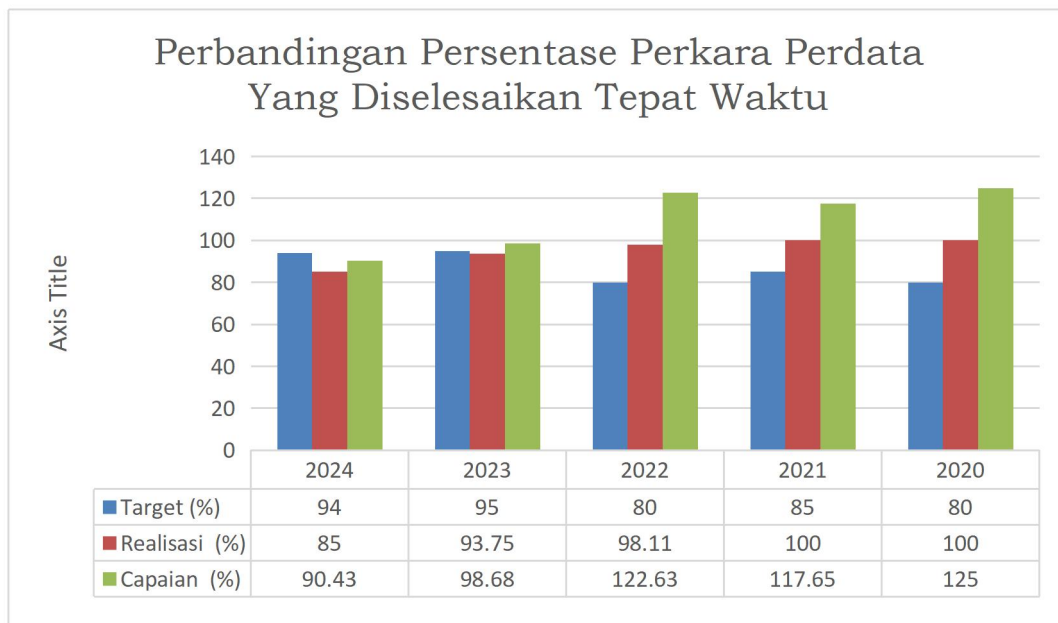
Pada Tabel 3. 7. Capaian Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 di dapat nilai realisasi

indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar **85%**. Nilai tersebut di dapat dari perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perkara perdata yang diselesaikan dikali seratus. Untuk nilai capaian indikator kinerja ini sebesar **90.43%**. Nilai tersebut didapat dari perbandingan antara realisasi sebesar 85% berbanding target yang telah ditetapkan sebesar 94% lalu dikali 100%.

Tabel 3. 7. Perbandingan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a. Persentase Perkara perdata yang diselesaikan Tepat waktu	2024	94	85	90.43
	2023	95	93,75	98,68
	2022	80	98,11	122.63
	2021	85	100	117.65
	2020	80	100	125

Dari sini dapat dianalisa bahwasanya tahun 2024 terjadi penurunan Capain Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu dikarenakan Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023, Realisasi 2024 mendapatkan nilai 85% sedangkan untuk 2023 nilai tersebut sebesar 93.75%.Berikut ini grafik dari Perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu:



Grafik 3. 1. Perbandingan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 sd 2024

3.1.2. Analisis Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sama seperti perkara perdata, tenggat waktu lamanya penyelesaian perkara pidana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Berikut ini tabel persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu .

Tabel 3. 8. Rekapitulasi Perkara Pidana Tahun 2024

Perkara	Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perkara Pidana yang Diselesaikan
Pidana Biasa	396	396
Pidana Anak	8	8

Pidana Singkat	1	1
Pidana Cepat	17	17
Praperadilan	4	4
Jumlah	422	426

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{422}{426} \times 100\% = \mathbf{99\%}$$

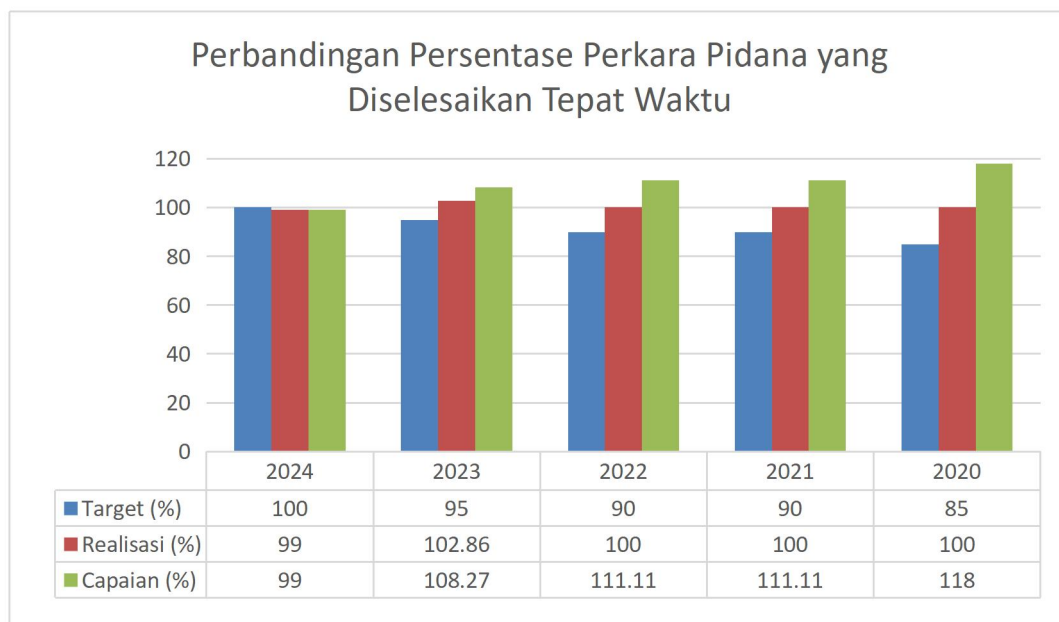
Pada tahun 2024 di dapat nilai realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar **99%**. Nilai tersebut di dapat dari perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perkara pidana yang diselesaikan dikali 100%. Dengan nilai realisasi sebesar **99%**. maka nilai capaian untuk indikator kinerja ini sebesar **99%**. Nilai tersebut didapat dari perbandingan antara realisasi sebesar 100% berbanding target yang telah ditetapkan sebesar 100% lalu dikali 100%.

Tabel 3. 9. Perbandingan Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 sd 2024

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat waktu	2024	100	99	99
	2023	95	102,86	108,27
	2022	90	100	111,11
	2021	90	100	111.11
	2020	85	100	118

Dari sini dapat dianalisa bahwasanya tahun 2024 terjadi penurunan Capain Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu dikarenakan adanya perubahan

kenaikan target dari 95% (2023) menjadi 100% (2024) dan Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023, Realisasi 2024 mendapatkan nilai 99% sedangkan untuk 2023 nilai tersebut sebesar 102,86%. Berikut ini grafik dari perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu:



Grafik 3. 2. Perbandingan Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 sd 2024

3.1.3. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Restorative justice

merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Pada tahun 2022 dan 2023, terdapat 1 perkara pidana yang diajukan untuk diselesaikan dengan restoratif dan terdapat 1 perkara yang dinyatakan berhasil:

Tabel 3. 10. Rekapitulasi Perkara Yang Diselesaikan Melalui Restoratif Tahun 2024

Jumlah Perkara yang diajukan dengan restoratif	Berhasil Restoratif	Tidak Berhasil Restoratif	Proses
27	1	26	0

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Perkara\ yang\ Diselesaikan\ Dengan\ Restoratif}{Perkara\ yang\ diajukan\ untuk\ restoratif} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{1}{27} \times 100\% = 4\%$$

Tabel 3. 11. Perkara Pidana Berhasil Restoratif Tahun 2023

Jumlah Perkara Pidana yang diajukan dengan restoratif	Berhasil Restoratif	Tidak Berhasil Restoratif	Proses
1	1	0	0

Jumlah perkara pidana yang diajukan menggunakan pendekatan restoratif pada tahun 2024 sebanyak 27 perkara, hanya 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Pada tahun 2023 terdapat 1 perkara yang diajukan menggunakan

pendekatan restoratif, dan perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

Tabel 3. 12. Perbandingan Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2024	5	4	80
	2023	100	100	100
	2022	10	100	1000
	2021	N/A	N/A	N/A
	2020	N/A	N/A	N/A

Pada tahun 2024 didapatkan Realisasi sebesar 4% hal ini berbanding terbalik dengan tahun 2023 dimana Realisasi sebesar 100%. Berikut ini grafik dari perbandingan jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif:



Grafik 3. 3. Perbandingan Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2020-2024

3.1.4. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tabel 3. 13. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024

Perkara	Perkara yang yang Diputus	Perkara yang Mengajukan Banding	Perkara yang tidak Mengajukan Banding	Target %	Realisasi %	Capaian %
Perdata	47	14	33	95	89	93.68
Pidana	423	39	384			
Jumlah	470	54	417			

Untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dimana untuk total perkara yang tidak mengajukan banding sebesar 416 perkara, dan untuk perkara yang diputus total perkara pidana dan perdata sebesar 470 perkara. Untuk rumus yang dipakai dalam mencari nilai persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

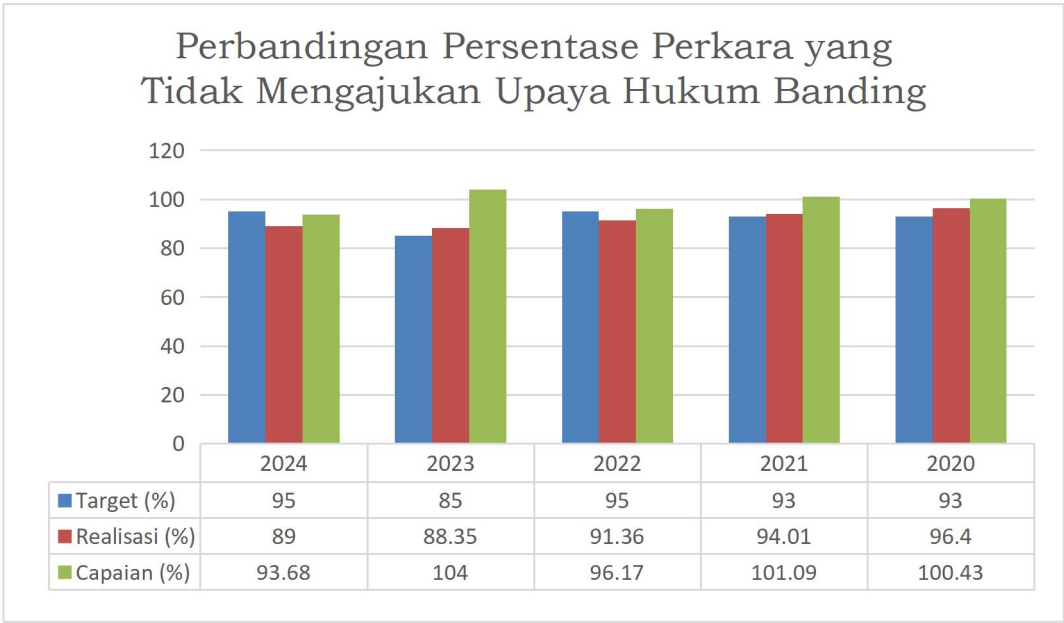
$$Realisasi = \frac{417}{470} \times 100\% = 89 \%$$

Tabel 3. 14. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 sd 2024

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	2024	95	89	93.68
	2023	85	88,35	104
	2022	95	91,36	96,17
	2021	93	94.01	101.09
	2020	93	96.40	100.43

Untuk nilai capaian tahun 2024 didapat dari perbandingan

antara realisasi sebesar 89% dengan target sebesar 95% lalu dikali 100% yaitu **93.68%**. Terdapat penurunan nilai capaian ditahun 2024 dan 2023 dimana tahun 2023 capaiannya sebesar 104%, dan ditahun 2024 sebesar 93.68%. hal ini dikarenakan adanya perubahan target dari Capain Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dimana semula dari tahun 2023 sebesar 85 dinaikan menjadi 95 ditahun 2024. Berikut ini grafik persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding:



Grafik 3. 4. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2024

3.1.5. Analisis Persentasae Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tabel 3. 15. Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Perkara yang Diputus	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara yang tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	47	N/A	N/A	85	N/A	N/A
Pidana	423	N/A	N/A			

Jumlah	470	N/A	N/A			
---------------	------------	------------	------------	--	--	--

Berdasarkan SK Sekretaris MA RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan indikator kinerja utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwasanya perkara kasasi yang dimaksud disini adalah:

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus beban murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara kasasi yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{0}{0} \times 100\% = \mathbf{0 \% \text{ atau N/A}}$$

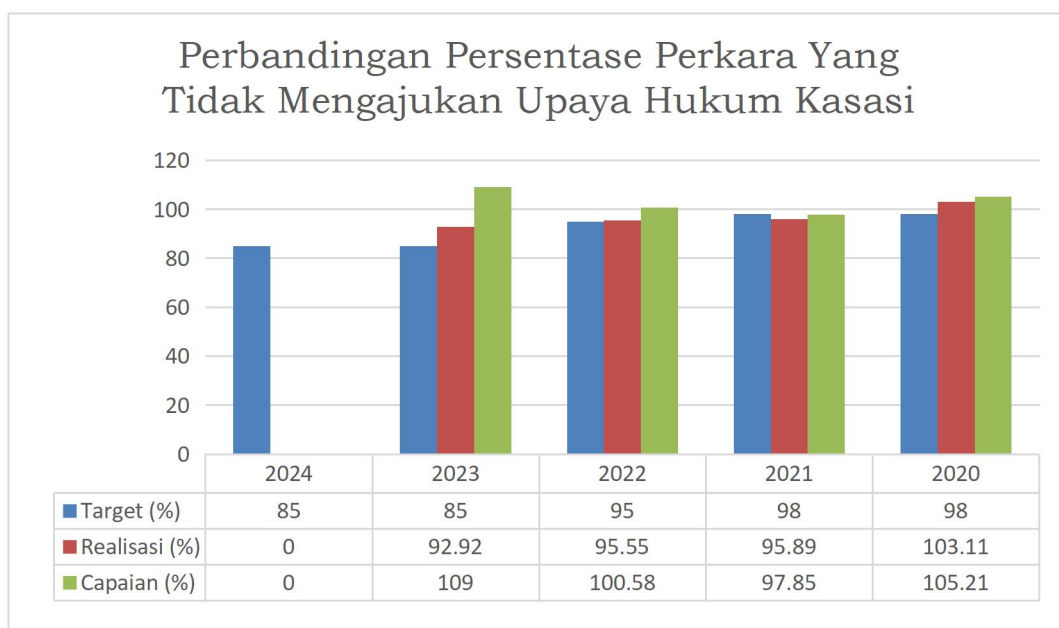
Hal ini dikarenakan karna memang sepanjang tahun 2024 untuk katagori upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus beban murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata memang tiak ada.

Tabel 3. 16. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
e. Persentase perkara	2024	85	N/A	N/A

yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2023	85	92,92	109
	2022	95	95,55	100,58
	2021	98	95.89	97.85
	2020	98	103.11	105.21

Berikut ini grafik dari perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasas Tahun 2020-2024



Grafik 3. 5. Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024

3.1.6. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut Pasal 1 Angkat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah

berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak & orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan masyarakat dan piha-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restorative.

Pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak dijelaskan tahapan musyawarah diversi adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi (hakim) dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
2. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi.
3. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
4. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b. Orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
5. Pekerja social professional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk

memperoleh penyelesaian.

6. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
7. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
8. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi.
9. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik.

Pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terdapat 3 (tiga) perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

Tabel 3. 17. Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2024

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
7	3	0	90	N/A	N/A

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

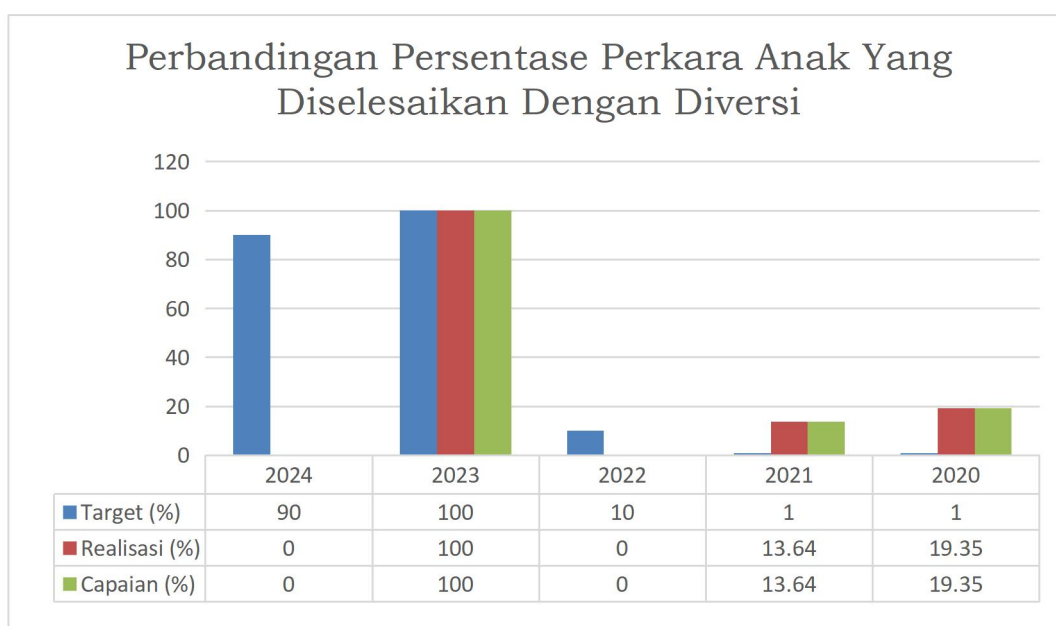
$$Realisasi = \frac{0}{3} \times 100\% = 0\%$$

Tabel 3. 18. Perbandingan Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
f. Persentase perkara	2024	90	N/A	N/A

anak yang diselesaikan dengan Diversi	2023	100	100	100
	2022	10	0	0
	2021	1	13.64	13.64
	2020	1	19.35	19.35

Dengan nilai realisasi **0%** atau **N/A** dan target sebesar 90% maka capaian di dapat sebesar **0%** atau **N/A**. Capaian yang didapat pada indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi tahun 2024 berarti tidak ada perkara yang diselesaikan di Pengadilan secara diversi ditahun 2024 dikarenakan perkara tersebut selesai ditingkat penyidik. Berikut ini grafik Perbandingan Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi:



Grafik 3. 6. Perbandingan Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

3.1.7. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman

Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Index Kepuasan Pencari Keadilan” ditampilkan pada tabel berikut:

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melakukan survey kepuasan masyarakat setiap triwulan yang mana setiap tahun nya berakhir pada periode IV (September sd November). Metode yang dilakukan dalam survey ini adalah metode random sampling, dengan populasi penelitian semua masyarakat pengguna layanan pengadilan seperti: masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan memberikan kuesioner atau angket. Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain: Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3. 19. Nilai Interval Konversi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Internal Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja dan Pelayanan
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik

Hasil survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 20. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Periode	Jumlah Responden	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori Mutu Pelayanan
Januari - Maret 2024	71	99.88	Sangat Baik
Apri - Juni 2024	84	99.93	Sangat Baik
Juli - September 2024	84	100	Sangat Baik
Oktober - Desember 2024	68	100	Sangat Baik
Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024		100	Sangat Baik

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

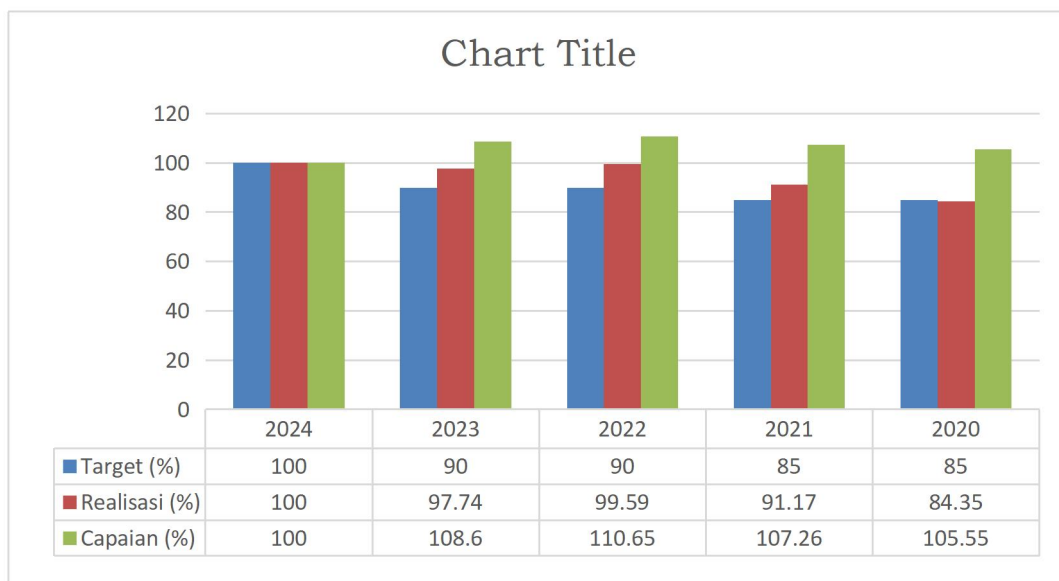
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa total hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2024 (semester I sd IV) memiliki nilai sebesar **100%** yang berarti kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berkategori **SANGAT BAIK**. Diketahui target indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 100% dan realisasi yang

di dapat 100 maka capaian dari indikator ini sebesar **100%**.

Tabel 3. 21. Perbandingan Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 sd 2024

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	2024	100	100	100
	2023	90	97,74	108,6
	2022	90	99,59	110,65
	2021	85	91.17	107.26
	2020	85	84.35	105.55

Pada tahun 2024 dan tahun 2023 untuk indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dari capaian tahun 2023 sebesar 108,6% menjadi 100% pada tahun 2024. hal ini dikarenakan adanya jumlah responden yang berkurang pada tahun 2024 sehingga mempengaruhi komponen perhitungan penilaian. Berikut ini Grafik Perbandingan Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan:



Grafik 3. 7. Perbandingan Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang

Sasaran II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri dari 3 (tiga) indikator antara lain: Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu, Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu, Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi. Berikut tabel sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Tabel 3. 22. Capaian Sasaran Strategis II Tahun 2024

Sasaran Strategis II		
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		
Indikator Kinerja		Capaian
a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100
b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100
c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	86.67
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II		95,56

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara telah berjalan dengan sangat **baik**. Capaian ini wujud dari keberhasilan semua jajaran pimpinan dibantu staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal administrasi perkara modern seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Direktori Putusan dan implementasi *e-court* semua elemen yang terkait dalam sistem tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya ditambah kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Untuk tahun 2024 capaian peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 3. 23. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis II Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		
Indikator Kinerja	Tahun	Capaian (%)
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2024	100
	2023	100
	2022	100
	2021	133.33
	2020	57.14
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2024	100
	2023	100
	2022	100
	2021	100
	2020	66.67
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2024	86.67
	2023	100
	2022	0
	2021	15.15
	2020	0

3.1.8. Analisis Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan pada angka 1 disebutkan bahwa pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan pada perkara perdata dikenakan biaya PNBPN, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang

bersangkutan.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah perbandingan salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus lalu dikali 100%.

Tabel 3. 24. Rekapitulasi Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2024

Perkara Perdata	Perkara yang Dikirim Tepat Waktu	Perkara yang Diselesaikan
Perdata Gugatan	46	46
Perdata Gugatan Sederhana	58	58
Perdata Permohonan	39	39
Jumlah	143	143

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{143}{143} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

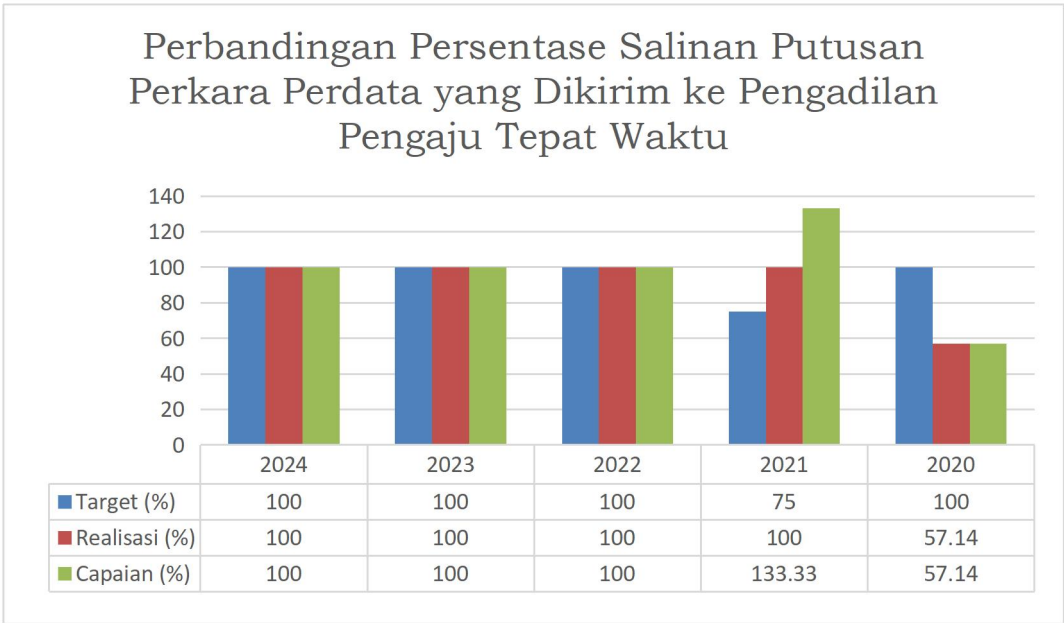
Pada tahun 2024 terdapat 143 perkara perdata yang putus. Karena ketidakhadiran salah satu atau beberapa pihak saat pembacaan putusan di persidangan membuat amar putusannya wajib diberitahukan oleh jurusita/ jurusita pengganti kepada para pihak. Dari 143 putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya tersebut, keseluruhan relaas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak sehingga nilai realisasi untuk indikator ini sebesar 100%. Dengan target dan realisasi 100% maka capaian indikator persentase salinan putusan perkara

perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi teknis perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah berjalan sesuai dengan *Standar Prosedure Operational* yang ditetapkan.

Tabel 3. 25. Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020 sd 2024

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2024	100	100	100
	2023	100	100	100
	2022	100	100	100
	2021	75	100	133.33
	2020	100	57.14	57.14

Berikut ini grafik Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu:



Grafik 3. 8. Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

3.1.9. Analisis Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan pada angka 2 disebutkan bahwa untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan Salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah perbandingan salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus lalu dikali 100%.

Tabel 3. 26. Rekapitulasi Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2024

Perkara Pidana	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perkara yang Diselesaikan
Pidana Biasa	396	396
Pidana Anak	8	8
Pidana Singkat	1	1
Pidana Cepat	17	17
Praperadilan	4	4
Jumlah	426	426

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Salinan\ Putusan\ Perkara\ Pidana\ yang\ diminutasi\ dan\ dikirim\ tepat\ waktu}{Jumlah\ Putusan} \times 100\%$$

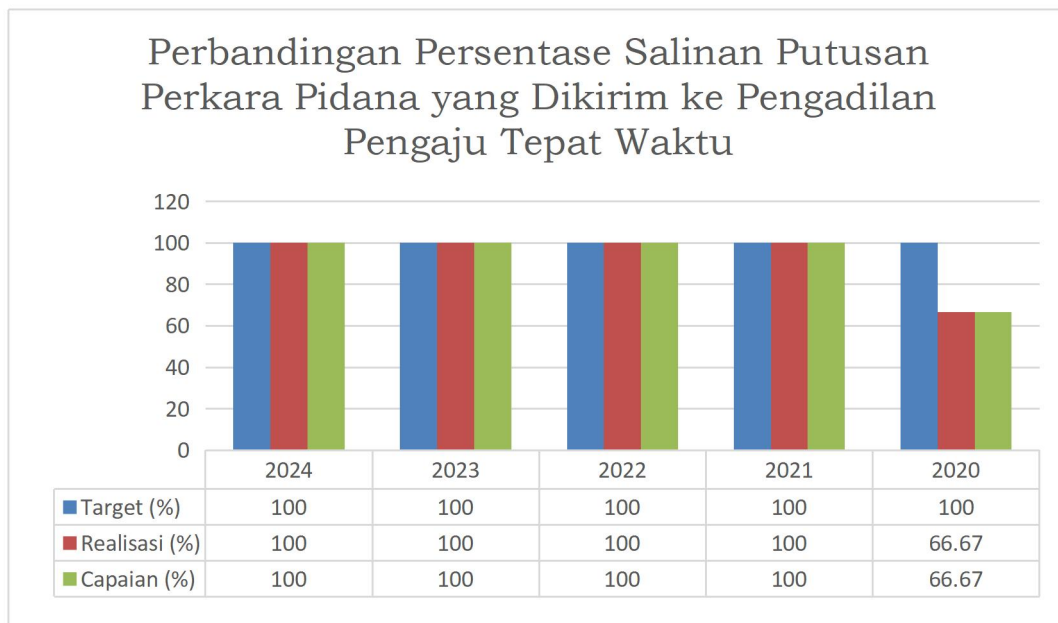
$$Realisasi = \frac{426}{426} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Pada tahun 2024 terdapat 426 perkara pidana yang putus. Karena ketidakhadiran salah satu atau beberapa pihak saat pembacaan putusan di persidangan membuat amar putusannya wajib diberitahukan oleh jurusita kepada para pihak . Dari 426 putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya tersebut, keseluruhan relaas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak sehingga nilai realisasi untuk indikator ini sebesar 100%. Dengan target 100% maka capaian indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim para pihak tepat waktu sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi teknis perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah berjalan sesuai dengan Standar Prosedure Operational yang ditetapkan.

Tabel 3. 27. Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2024	100	100	100
	2023	100	100	100
	2022	100	100	100
	2021	100	100	100
	2020	100	66.67	66.67

Berikut ini grafik Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu:



Grafik 3. 9. Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

3.1.10. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian perkara dengan dibantu pihak ketiga (mediator) yang netral atau tidak memihak baik itu dari hakim maupun non-hakim yangmana untuk menjadi seorang mediator harus memiliki sertifikat terlebih dahulu sebagai seorang mediator. Peranan mediator adalah sebagai penengah yang memberikan bantuan berupa alternative penyelesaian perkara. Pada tahun 2024, terdapat 30 (tiga puluh) perkara yang di mediasi. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. 28. Rekapitulasi Perkara yang Berhasil Mediasi tahun 2024

Jumlah Perkara Perdata yang Mediasi	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Proses
30	4	26	0

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

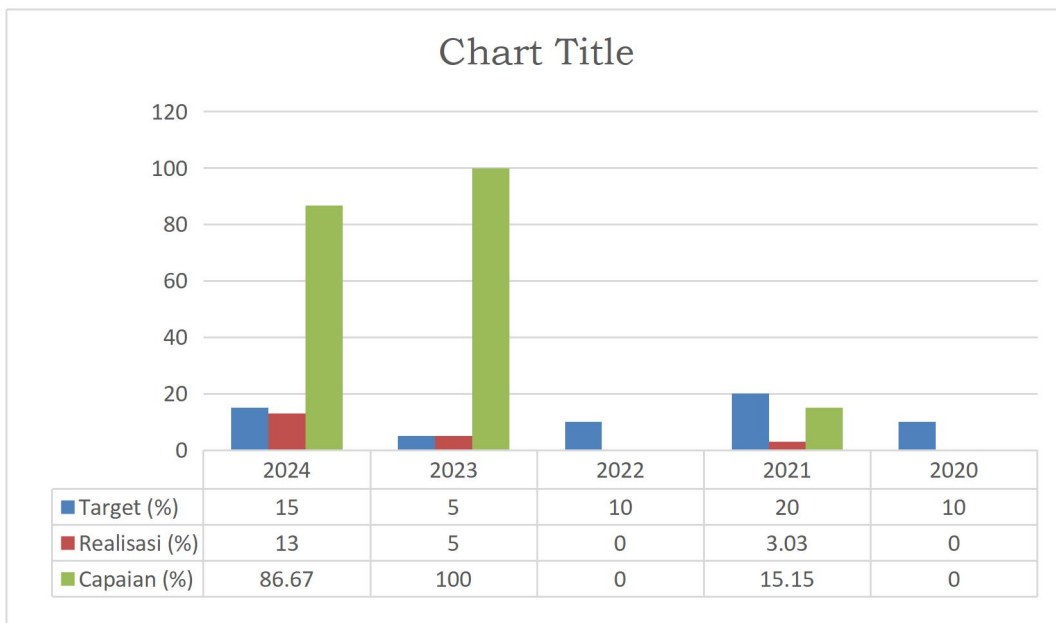
$$Realisasi = \frac{4}{30} \times 100\% = 13 \%$$

Jumlah perkara perdata gugatan yang selesai dimediasi pada tahun 2024 sebanyak 4 perkara dari 30 perkara perdata yang dilakukan secara mediasi. Dengan begitu nilai realisasi dan capaian indikator sebesar 13% dan 100% dengan target yang telah ditetapkan kedalam reuiu IKU sebesar 15%. Kemudian penyebab perkara gugatan tidak dapat diselesaikan seluruhnya melalui mediasi biasanya dikarenakan adanya rasa ketidakadilan masing-masing pihak atas hasil mediasi yang ingin mereka sepakati atau jauh dari harapan masing-masing pihak selama proses mediasi berlangsung.

Tabel 3. 29. Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2024	15	13	86.67
	2023	5	5	100
	2022	10	N/A	N/A
	2021	20	3.03	15.15
	2020	10	N/A	N/A

Berikut ini grafik dari Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi:



Grafik 3. 10. Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum). Berikut tabel capaiannya:

Tabel 3. 30. Capaian Sasaran Strategis III tahun 2023

Sasaran Strategis III							
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan							
Indikator Kinerja							Capaian
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)						100%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III							100%

Tabel 3. 31. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis III Tahun 2020-2023

Sasaran Strategis II Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		
Indikator Kinerja	Tahun	Capaian (%)
a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2024	100
	2023	100
	2022	100
	2021	100
	2020	100

3.1.11. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa atau saksi) yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.
 - c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat apabila yang bersangkutan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a / b.
- a. Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan yaitu:
 - a. Pemberian informasi, konsultasi atau advice hukum.
 - b. Bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan.
 - c. Penyediaan informasi Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada tahun anggaran 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum “Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai untuk pemberi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Adapun anggaran yang dialokasikan dan realisasinya tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 32. Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2024

Output	Volume / Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
(1049. QBA.032) Pos Bantuan Hukum	240 OJ /Orang perjam	28.000.000	28.000.000	100%	0

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{30}{30} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu lalu dikali 100%. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) dengan target yang ditetapkan dikalikan serratus.

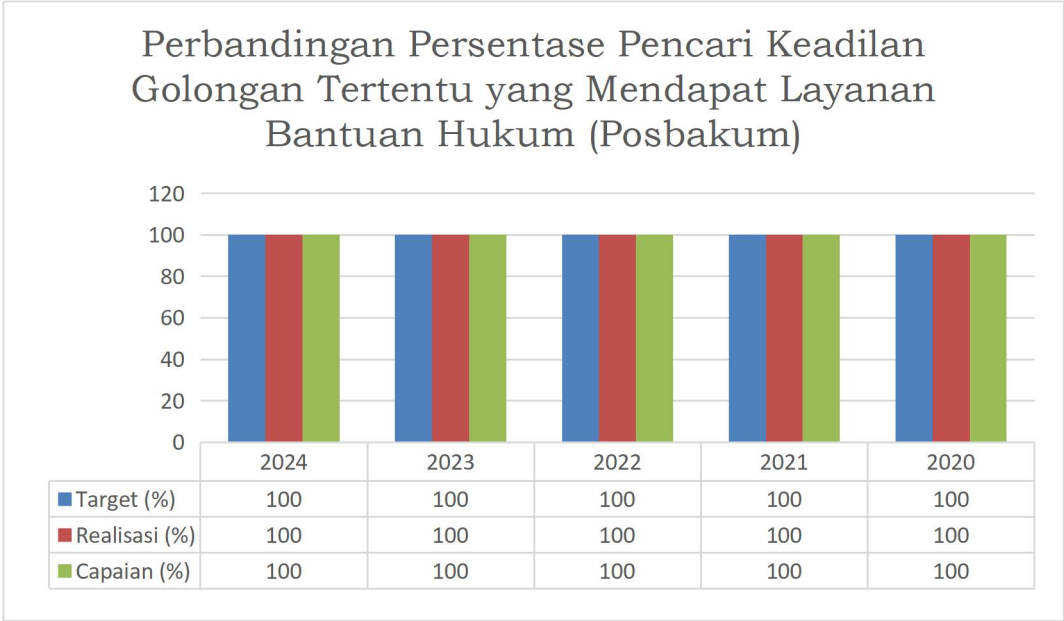
Diketahui pada tahun 2024 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan jumlah pemohon layanan hukum sebanyak 30 (tiga puluh) orang sehingga nilai realisasinya sebesar 100%. Dengan target dan realisasi sebesar 100% maka capaian indikator kinerja ini sebesar **100%**.

Tabel 3. 33 Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2024	100	100	100
	2023	100	100	100
	2022	100	100	100
	2021	100	100	100
	2020	100	100	100

Capaian pada tahun 2020 sampai dengan 2024 masih mendapatkan nilai yang sama sebesar **100%**. Untuk menjaga konsistensi nilai yang didapatkan maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai harus menambahkan kesadaran dan informasi

yang terbuka baik itu melalui website, browsur maupun spanduk yang mana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki layanan posbakum. Berikut ini grafik Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum):



Grafik 3. 11. Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020 sd 2024

Sasaran IV : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pada sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ada satu indikator kinerja yang ditetapkan yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Berikut tabel capaian sasaran ini :

Tabel 3. 34. Capaian Sasaran Strategis IV Tahun 2024

Sasaran Strategis IV		
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		
Indikator Kinerja		Capaian
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti	100

Sasaran Strategis IV	
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	
Indikator Kinerja	Capaian
(Dieksekusi)	
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV	100%

Tabel 3. 35. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis IV Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis IV Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		
Indikator Kinerja	Tahun	Capaian (%)
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	2024	55
	2023	100
	2022	100
	2021	0
	2020	0

3.1.12. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Tabel 3. 36. Rekapitulasi Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Tahun	Jumlah Putusan BHT dan dimohonkan eksekusi	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian
2024	4	1	42	25	55

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

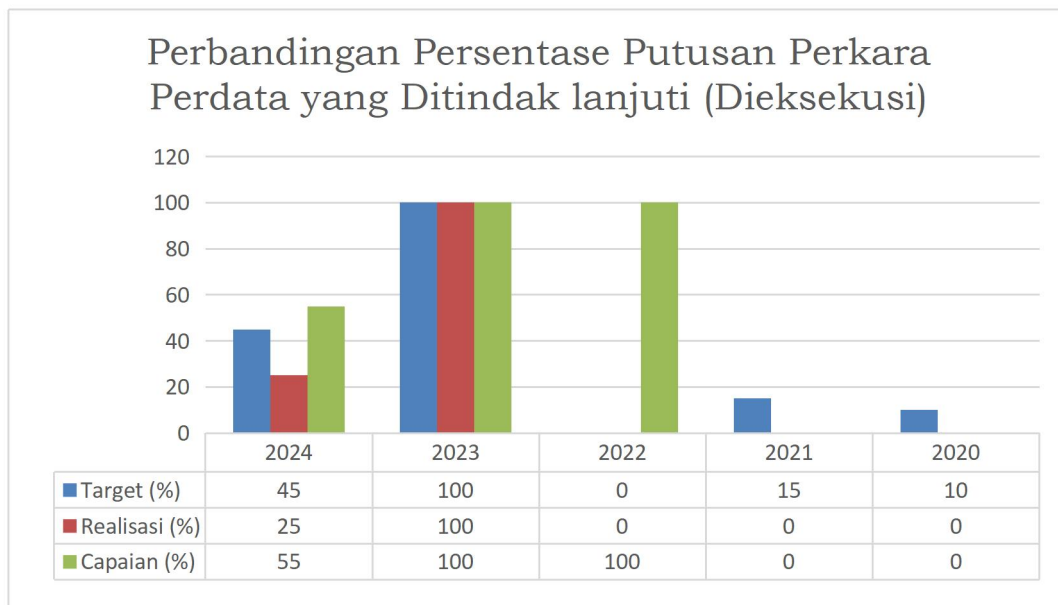
$$Realisasi = \frac{1}{4} \times 100\% = \mathbf{25\%}$$

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melaksanakan/menindak lanjuti 1 (satu) eksekusi dari 4 (empat) eksekusi yang diajukan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Tabel 3. 37.Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	2024	45	25	55
	2023	100	100	100
	2022	0	0	100
	2021	15	0	0
	2020	10	0	0

Pada Tahun 2024 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) mengalami penurunan Capaian dari Tahun 2023 sebesar **100%**, menjadi **55%** pada Tahun 2024. Berikut ini Grafik Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi):



Grafik 3. 12. Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Tahun 2020-2024

3.1.13. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2024 ini dapat dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Keberhasilan dan peningkatan kinerja pada Tahun 2024 pada beberapa target di karenakan:

- a. Adanya komitmen yang besar dari pimpinan sampai kepada pelaksana untuk tetap berkomitmen dalam melaksanakan Setandar Operasional (SOP) dan *desk job* pada setiap bagian;
- b. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melaksanakan administrasi perkara secara lebih tertib;
- c. Adanya aplikasi Monitoring SIPP (MIS) yang dapat

- memonitoring kinerja penyelesaian perkara yang bisa dipantau oleh tiap pengguna SIPP dan juga pimpinan satker;
- d. Dilaksanakannya rapat evaluasi kinerja secara berkala baik di internal ruangan kepaniteraan / subbagian masing-masing dan rapat bulanan keseluruhan.
 - e. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur bahwa penyelesaian perkara di tingkat banding adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara masuk hingga perkaraminutasi.
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Adapun penurunan atau tidak tercapainya target yang diinginkan hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu:

Pada indikator kinerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu belum dapat mencapai target baik target ditahun 2024. yang mana untuk target tahun 2024 sebesar 94% sampai akhir 2024 mencapai 85% atau capaian ouput sebesar 90.43%. Hal ini dikarenakan para pihak ada yang tidak hadir/berhalangan hadir, kemudian dilakukan pemanggilan lagi ditambah dengan banyaknya saksi yang diajukan para pihak secara bertahap dan tidak sekaligus. Selain itu terkait kondisi geografis wilayah hukum Pangkalan Balai yg meliputi perairan dan perkebunan yang mana baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi para pihak untuk hadir pada persidangan.

Untuk indikator kinerja yang telah tercapai targetnya, Pengadilan Pangkalan Balai akan berusaha untuk mempertahankan. Untuk indikator kinerja yang belum tercapai dengan baik, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai akan berusaha semaksimal

mungkin agar indikator kinerja tersebut dapat terlaksana dan realisasinya sesuai dengan target yang diinginkan.

3.1.14. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi tentunya menggunakan sumber daya baik berupa Sumber Daya Anggaran maupun Sumber Daya Manusia.

a. Analisis efisiensi Sumber Daya Anggaran

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mendapatkan Pagu Awal DIPA 01 sebesar Rp. 3.095.749.000 (*Tiga Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang mana terdapat penambahan anggaran dari pusat untuk penambahan Gaji dan Tunjangan dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor menjadi RP. 4.805.749.000 (*Empat Miliar Delapan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dan Pagu Awal DIPA 03 sebesar Rp. 171.800.000 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Implementasi pengukuran efektifitas anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dilakukan melalui perhitungan rasio antara realisasi anggaran belanja dengan pagu anggaran belanja keseluruhan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, hasil persentase dikategorikan kedalam beberapa tingkatan:

- a. Tingkat pencapaian diatas 100%: Sangat Efektif
- b. Tingkat pencapaian 90% - 100%: Efektif
- c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90%: Cukup Efektif
- d. Tingkat pencapaian 60% - 80%: Kurang Efektif
- e. Tingkat pencapaian dibawah 60%: Tidak Efektif

Tabel 3. 38. Tingkat Efektifitas Anggaran DIPA 01 Tahun 2024

NO	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat	KET
----	----------	------	-----------	---------	-----

				efektifitas	
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.442.501.000	3.392.375.051	98.54	Efektif
2	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	1.363.248.000	1.336.08.545	98.00	Efektif

Tabel 3. 39. Tingkat Efektifitas Anggaran DIPA 03 Tahun 2024

NO	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat efektifitas	KET
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	169.310.000	167.544.841	98.96	Efektif
2	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28.000.000	27.999.996	100	Sangat Efektif

b. Analisis efisiensi Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2024 jumlah pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang terdiri dari 5 (lima) Orang Hakim, 8 (Delapan) Orang Pejabat Struktural, 10 (sepuluh) Orang Pejabat Fungsional, 6 (enam) Orang Pelaksana, 1 (satu) orang PPPK dan 8 (delapan) Orang PPNPN.

Tabel 3. 40. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Hakim (Ketua / Wakil)	1	4	5
2	Panitera	1	-	1

3	Panitera Muda Hukum	1	-	1
4	Panitera Muda Perdata	1	-	1
5	Panitera Muda Pidana	1	-	1
6	Panitera Pengganti	4	3	7
7	Jurusita	2	1	3
Jumlah		11	8	19

Tabel 3. 41. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris	1	-	1
2	Kasubag Umum dan Keuangan	1	-	1
3	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	-	1	1
4	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-	1
5	Pelaksana	2	4	6
6	PPPK	-	1	1
7	Tenaga Honorer (PPNPN)	6	2	8
Jumlah		11	8	19

Untuk jumlah hakim, ASN, P3K dan PPNPM yang ada masih sangat kurang untuk menangani beban pekerjaan yang ada yang mana juga ada beberapa pelaksana dan juga PPNPM masih merangkap dalam beberapa pekerjaan seperti operator keuangan maupun petugas PTSP.

3.1.15. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2024 telah disusun dengan mengacu pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai baik kegiatan utama / prioritas maupun kegiatan pendukung.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima.

Adapun untuk pencapaian pada tahun 2024 ini diperoleh dengan kerja keras semua SDM yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun briefing bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan. Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh pimpinan sesuai petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Demikian juga dengan adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, laporan tersebut dapat dijadikan *feedback* (umpan balik) dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 untuk DIPA 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mendapatkan total alokasi anggaran sebelum revisi sebesar Rp. 3.095.749.000,- (*Tiga Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) kemudian setelah dilakukan revisi sebesar Rp. 4.805.749.000,- (*Empat Miliar*

Delapan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Sedangkan untuk DIPA 03 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mendapatkan total alokasi anggaran sebelum revisi sebesar Rp. 171.800.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) kemudian setelah dilakukan revisi sebesar Rp. 169.310.000,-(*Seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*). Adapun rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

❖ **DIPA 01 Badan Urusan Administrasi**

Di bawah ini tabel pagu dan Realisasi Belanja Dipa 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (401909) tahun 2024:

Tabel 3. 42. Pagu dan Realisasi Belanja DIPA 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Gaji dan Tunjangan	3.442.501.000	3.392.375.051	50.125.949	98.54
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.363.248.000	1.336.018.545	27.229.455	98.00
TOTAL	4.805.749.000	3.392.375.051	77.355.404	98,39

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa susunan RKA K/L anggaran dipa 01 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk periode 2024 terdiri dari 2 (dua) komponen. Antara lain: Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, untuk Gaji dan tunjangan dari total anggaran sebesar Rp. 3.442.501.000,- (*Tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus satu ribu rupiah*) terserap 98.54% atau sebesar Rp. 3.392.375.051,- (*Tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh satu rupiah*).

Operasional & Pemeliharaan kantor dengan total anggaran

Rp. 1.363.248.000,- (*Satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) terserap 98.00% atau Rp 1.336.018.545,- (*Satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan belas ribu lima ratus empat puluh lima*).

❖ **DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum**

Di bawah ini tabel pagu dan Realisasi Belanja Dipa 03 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (402017) tahun 2024:

Tabel 3. 43. Pagu dan Realisasi Belanja DIPA 03

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	141.310.000	139.544.845	1.765.155	98.75
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28.000.000	27.999.996	4	100
TOTAL	169.310.000	167.544.841	1.765.159	98,75

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa postur alokasi anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (402017) terdiri dari dua jenis belanja yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum Perseorangan, untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dari total anggaran sebesar Rp. 141.310.000,- (*Seratus empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*) terserap 98.75% atau Rp. 139.544.845,- (*Seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima*).

Layanan Bantuan Hukum Perseorangan dengan anggaran sebesar Rp.28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*) terserap 100% atau Rp. 27.999.996,- (*Dua puluh tujuh juta sembilan ratus*

sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi (LKjIP).

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Untuk nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2024 sebesar 102,38%

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai khususnya sampai dengan periode 2024 antara lain:

1. Masih kurangnya jumlah hakim dan panitera pengganti, sehingga jadwal persidangan menumpuk yang otomatis menghambat dalam waktu penyelesaian persidangan atau perkara.
2. Kurangnya ASN golongan II terutama untuk ditempatkan sebagai operator dan petugas register.
3. Kurangnya anggaran baik dipa dari Badan urusan Administrasi (dipa 01) maupun dari Badan Peradilan Umum (dipa 03) guna menunjang operasional. Hal tersebut seringkali mengharuskan satuan kerja untuk merevisi anggaran baik itu antar komponen maupun antar satker dan juga mengajukan Anggaran Tambahan Belanja (ABT).
4. Masih minimnya pelatihan baik untuk strukturan maupun fungsional bagi aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai guna meningkatkan kemampuan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

4.2. Rekomendasi

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ditemukan

beberapa kendala dan hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu lebih ditingkatkannya pelatihan baik bagi Hakim, Pejabat dan Staf Fungsional maupun Struktural terkait peningkatan mutu kerja dan juga keterampilan guna menghadapi tuntutan dan perkembangan di dunia kerja.
2. Perlu adanya peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
4. Dibutuhkannya pemantauan secara berkala dan berjenjang pada setiap bidang dari pimpinan guna menjaga akuntabel (monev berkala).
5. Keterbukaan, kerjasama dan perhitungan yang profesional di tiap bagian guna memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.
6. Untuk mencapai keberhasilan dalam program yang telah ditetapkan dalam sasaran kerja dan indikator kerja, diperlukan Sumber Daya Manusia yang cakap dan handal, Sistem Operasional Prosedur yang telah dijalankan sesuai

peraturan yang berlaku, kerjasama yang baik dan kedisiplinan tinggi setiap personil di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai serta memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peradilan.

LAMPIRAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Jakarta, 24 Desember 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
pada Empat Lingkungan Peradilan

Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk Menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;
6. Laporan Kinerja Tahun 2024.

Dokumen SAKIP sebagaimana tersebut di atas disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2025 melalui:

1. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link <https://esr.menpan.go.id/>



2. Aplikasi e-SAKIP pada KOMDANAS dengan *username* Perencanaan Satker pada link <https://komdanas.mahkamahagung.go.id/>
3. Website masing-masing Satuan Kerja.

Apabila masih memerlukan penjelasan ataupun asistensi dalam penyusunan Dokumen SAKIP, dapat menghubungi Badan Urusan Administrasi c.q Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,



Sugiyanto



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 3/KPN.W6-U10/SK.OT1.6/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

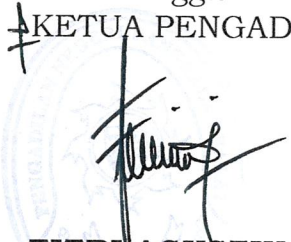
1.

- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2025;
- KEEMPAT : Segala biaya ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 2 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



FITRI AGUSTINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 3/KPN.W6-U10/SK.OT1.6/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Fitri Agustina, S.H.
2.	Koordinator Validasi Data	Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.
3.	Ketua	Bainal Hakim, S.H.
4.	Sekretariat	Andrianto Fachrizal, S.Kom.
5.	Anggota	1. A. Hairun Yulasni, S.H., M.H. 2. Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. 3. Beny Herlambang, S.H. 4. Rahmat Juniansyah 5. Mutiara Saputri
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. M. Iman Septian, S.IP. 2. M. Nouval Dwi Aditya, A.Md.

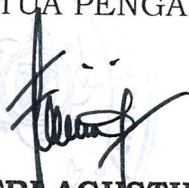
KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



FITRI AGUSTINA

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Jabatan	Tugas
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada aparatur pengawasan intern pemerintah
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisa indikator kinerja pada masing masing unit Eselon I
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

FITRI AGUSTINA



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 2/KPN.W6-U10/SK.RA1.3/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

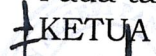
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 2 Januari 2025

 KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



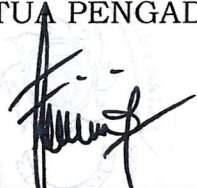
FITRI AGUSTINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 2/KPN.W6-U10/SK.RA1.3/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TAHUN 2025**

No.	Jabatan	Nama
1.	Pembina	Fitri Agustina, S.H.
2.	Penganggung Jawab	Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Bainal Hakim, S.H.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Andrianto Fachrizal, S.Kom.
5.	Pelaksana	1. A. Hairun Yulasni, S.H., M.H. 2. Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. 3. Beny Herlambang, S.H. 4. Rahmat Juniansyah 5. Mutiara Saputri
6.	Tim Pengelola Data	1. M. Iman Septian, S.IP. 2. M. Nouval Dwi Aditya, A.Md.

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



FITRI AGUSTINA



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 1/KPN.W6-U10/SK.RA.1.1/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentang pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

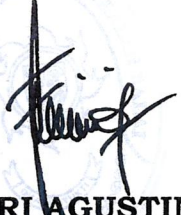
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 2 Januari 2025

✱ KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

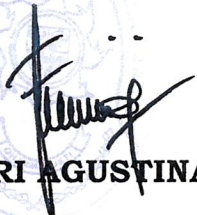

FITRI AGUSTINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 1/KPN.W6-U10/SK.RA1.1/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

No.	Jabatan	Nama
1.	Pembina	Fitri Agustina, S.H.
2.	Penanggung Jawab	Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.
3.	Pengarah	Bainal Hakim, S.H.
4.	Koordinator	Andrianto Fachrizal, S.Kom.
5.	Sekretaris	M. Iman Septian, S.IP.
6.	Anggota	1. A. Hairun Yulasni, S.H., M.H. 2. Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. 3. Beny Herlambang, S.H. 4. Rahmat Juniansyah 5. Mutiara Saputri, S.E.

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



FITRI AGUSTINA



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 4/KPN.W6-U10/SK.RA.1.1/I/2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

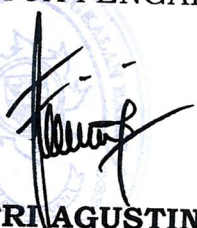
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 2 Januari 2025

† KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,


FITRI AGUSTINA



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 129/KPN.W6-U10/SK.PW1/XI/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa telah terjadi promosi dan mutasi Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1090/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
- b. Bahwa guna kelancaran dan terkontrolnya administrasi kantor, maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- c. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 104/KPN.W6-U10/SK.PW1/VIII/2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 5 Agustus 2024;
- KEDUA : Menetapkan susunan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran ini;
- KETIGA : Memerintahkan kepada nama-nama Hakim Pengawas untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 26 November 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



FITRI AGUSTINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 129/KPN.W6-U10/SK.PW1/XI/2024
Tanggal : 26 November 2024

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Tugas
1.	VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. NIP. 197901162002122001	Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua	KOORDINATOR PENGAWAS BIDANG
2.	HARI MUKTIYONO, S.H. NIP. 198909012017121007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN; 2. HAKIM PENGAWAS BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN; 3. HAKIM PENGAWAS SIPP.
3.	SYARIFA YANA, S.H., M.H. NIP. 198701152017122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PIDANA; 2. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PERDATA.
4.	AYU CAHYANI SIRAIT, S.H., M.H. NIP. 199306042017122002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN HUKUM; 2. HAKIM PENGAWAS BIDAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA; 3. HAKIM PENGAWAS PTSP.


KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,
FITRI AGUSTINA



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 153/KPN.W6-U10/SK.TI1/XII/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN
PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa telah terjadi promosi dan mutasi Kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1105/DJU/SK.KP4.1/3/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
- b. Berdasarkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif, efisien dan ekonomis merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan;
- c. Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan
- d. Bahwa perlu ditetapkan Koordinator dan Tim SIPP, di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai guna mewujudkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang transparan seperti tersebut dalam pertimbangan angka 1 dan 2;
- e. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas diatas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 118/KPN.W6-U10/SK.TI1/VIII/2024 tentang Penunjukan Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 28 Agustus 2024;
- KEDUA : Menunjuk pejabat/pegawai yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- KETIGA : Mengenai penunjukan koordinator dan petugas ini agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 16 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



FITRI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 153/KPN.W6-U10/SK.TI1/XII/2024
Tanggal : 16 Desember 2024

**PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN
PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
TIM KAJIAN			
1.	HARI MUKTIYONO, S.H. NIP. 198909012017121007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim
TIM TEKNIS			
1.	BAINAL HAKIM, S.H. NIP. 196909031994031005	Penata Tk. I (III/d)	Panitera
2.	A. HAIRUN YULASNI, S.H., M.H. NIP. 197007251990031001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum
3.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H. NIP. 197909142005021001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Pidana
4.	BENY HERLAMBAANG, S.H. NIP. 198402012006041002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Perdata
5.	M. IMAN SEPTIAN, S.IP. NIP. 19850921 201101 1 011	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan
6.	BRENDY SUTRA, S.H., M.H. NIP. 198706292009041002	Penata (III/c)	Panitera Pengganti
7.	MATHYAS ADINATA, S.H., M.H. NIP. 198804022014031001	Penata (III/c)	Panitera Pengganti
8.	MAHMUDAH, A.Md.A.B. NIPPPK. 199810132023212007	VII	Arsiparis Pelaksana/Terampil
9.	M. NOUVAL DWI ADITYA, A.Md.	-	PPNPN
10.	ANGGA NOVRIADI, S.H.	-	PPNPN
11.	MOCHAMMAD APRIAN SAMONDRO, S.H.	-	PPNPN



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

FITRI AGUSTINA

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 3,095,749,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			3,095,749,000	
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan			3,095,749,000	
6986.EBA	Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			3,095,749,000	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit			
6986.EBA.994	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
001	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		3,095,749,000	
A	Gaji dan Tunjangan			1,832,501,000	
	Pembayaran gaji dan tunjangan			1,832,501,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			1,290,269,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	985,132,000	985,132,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	82,095,000	82,095,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	82,095,000	82,095,000	
	- Tambahan Kenaikan Gaji	1.0 THN	140,947,000	140,947,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			20,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	16,000	16,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			114,934,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	98,514,000	98,514,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	8,210,000	8,210,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	8,210,000	8,210,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			22,495,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	19,281,000	19,281,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,607,000	1,607,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,607,000	1,607,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			28,140,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			15,330,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	13,140,000	13,140,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 THN	1,095,000	1,095,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,095,000	1,095,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(401909)
Rp. 3,095,749,000

MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			78,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	66,000	66,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,000	6,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,000	6,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			64,698,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	64,698,000	64,698,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			198,000,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	198,000,000	198,000,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			38,920,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	33,360,000	33,360,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,780,000	2,780,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,780,000	2,780,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)			37,070,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	31,776,000	31,776,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,647,000	2,647,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,647,000	2,647,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)			9,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	7,000	7,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)			3,704,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.0 THN	3,176,000	3,176,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	264,000	264,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	264,000	264,000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)			1,480,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.0 THN	1,270,000	1,270,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	105,000	105,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	105,000	105,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 3,095,749,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	4,200,000 350,000 350,000	4,900,000 4,200,000 350,000 350,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Beras PPPK - Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	3,476,000 289,000 289,000	4,054,000 3,476,000 289,000 289,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	8,400,000	8,400,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,263,248,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			493,791,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN] - Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN] - THR Sopir [1 ORG x 1 BLN] - THR Satpam [2 ORG x 1 BLN] - THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN] - KEPERLUAN ALAT RUMAH TANGGA KANTOR	12.0 OB 24.0 OB 60.0 OB 1.0 OB 2.0 OB 5.0 OB 1.0 THN	3,683,000 3,683,000 3,348,000 3,683,000 3,683,000 3,348,000 105,204,000	466,461,000 44,196,000 88,392,000 200,880,000 3,683,000 7,366,000 16,740,000 105,204,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu) - Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	30.0 OB	911,000	27,330,000 27,330,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			222,630,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Lisensi Vidio Conference [1 THN x 1 KEG] - Langganan Internet	1.0 THN 12.0 BLN	3,000,000 15,500,000	189,000,000 3,000,000 186,000,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	969,167	11,630,000 11,630,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan telpon	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000 12,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 3,095,749,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522113	Belanja Langganan Air			6,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Langganan Air	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
522141	Belanja Sewa			4,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	
C	Pemeliharaan Kantor			321,103,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			136,032,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pemeliharaan gedung dan Bangunan	2496.0 M2	54,500	136,032,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			185,071,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali)	6.0 Unit	960,150	5,760,000	
	- Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali)	65.0 Unit	692,640	45,021,000	
	- BBM Sewa Roda 4	1.0 UT	18,000,000	18,000,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UT	20,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UT	3,000,000	6,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	4.0 UNIT	18,750,000	75,000,000	
	- Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN]	20.0 UT	219,000	4,380,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UT	690,000	2,760,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UT	750,000	4,500,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UT	730,000	3,650,000	
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor			71,584,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			25,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pakaian Dinas Honorer/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [35 ORG x 1 STEL]	35.0 STEL	600,000	21,000,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			46,584,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,326,000	15,912,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNPB [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	342,000	8,208,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	308,000	3,696,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	352,000	4,224,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	912,000	10,944,000	
E	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim			105,840,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(401909)
Rp. 3,095,749,000

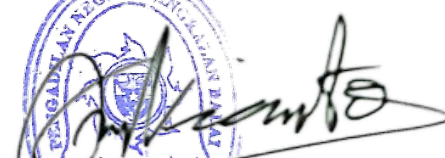
MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522141 H	Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu) - Sewa rumah dinas hakim [7 ORG x 12 BLN]	84.0 OB	1,260,000	105,840,000 105,840,000	RM
	Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding			40,300,000	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			40,300,000	
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 10 KEG]	80.0 OH	300,000	24,000,000	
I	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 10 KEG]	40.0 OK	200,000	8,000,000	RM
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 10 KEG]	40.0 OH	207,500	8,300,000	
	Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL			8,000,000	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			8,000,000	
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 5 KEG]	10.0 OK	100,000	1,000,000	RM
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]	20.0 OH	300,000	6,000,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 5 KEG]	10.0 OH	100,000	1,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 7 November 2024

Sekretaris



ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
NIP 197612032011011005

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 (REVISI XII)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 4,805,749,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			4,805,749,000	
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan			4,805,749,000	
6986.EBA	Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			4,805,749,000	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit			
6986.EBA.994	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
001	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,805,749,000	
A	Gaji dan Tunjangan			3,442,501,000	
	Pembayaran gaji dan tunjangan			3,442,501,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			1,554,892,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,335,202,140	1,335,202,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	108,495,000	108,495,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	108,195,000	108,195,000	
	- Tambahan Kenaikan Gaji	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			26,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	22,000	22,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			113,378,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	98,514,000	98,514,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,129,000	7,129,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,735,000	7,735,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			31,548,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	27,063,000	27,063,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,220,000	2,220,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,265,000	2,265,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			28,140,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			1,186,640,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	1,019,850,000	1,019,850,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 THN	83,395,000	83,395,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	83,395,000	83,395,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 (REVISI XII)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 4,805,749,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u>			131,080,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	84,638,000	84,638,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	23,291,000	23,291,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	23,151,000	23,151,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u>			82,056,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	82,056,860	82,056,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u>			241,982,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	241,982,000	241,982,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u>			15,180,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	13,360,000	13,360,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	910,000	910,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	910,000	910,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u>			40,494,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	34,776,000	34,776,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,859,000	2,859,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,859,000	2,859,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u>			9,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	7,000	7,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u>			134,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.0 THN	6,000	6,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	64,000	64,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	64,000	64,000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u>			20,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.0 THN	10,000	10,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	5,000	5,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,000	5,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 (REVISI XII)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 4,805,749,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	4,200,000 350,000 350,000	4,900,000 4,200,000 350,000 350,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Beras PPPK - Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	3,476,000 73,000 73,000	3,622,000 3,476,000 73,000 73,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	8,400,000	8,400,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,363,248,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			476,781,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN] - Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN] - THR Sopir [1 ORG x 1 BLN] - THR Satpam [2 ORG x 1 BLN] - THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN] - KEPERLUAN ALAT RUMAH TANGGA KANTOR	12.0 OB 24.0 OB 60.0 OB 1.0 OB 2.0 OB 5.0 OB 1.0 THN	3,683,000 3,683,000 3,348,000 3,683,000 3,683,000 3,348,000 57,206,400	418,463,000 44,196,000 88,392,000 200,880,000 3,683,000 7,366,000 16,740,000 57,206,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu) - Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	30.0 OB	1,943,934	58,318,000 58,318,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			212,530,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Lisensi Vidio Conference [1 THN x 1 KEG] - Langganan Internet	1.0 THN 12.0 BLN	3,000,000 15,500,000	189,000,000 3,000,000 186,000,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	116,667	1,400,000 1,400,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan telpon	12.0 BLN	914,917	10,979,000 10,979,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 (REVISI XII)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 4,805,749,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522113	Belanja Langganan Air			7,078,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Langganan Air	12.0 BLN	589,834	7,078,000	
522141	Belanja Sewa			4,073,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	4,073,000	4,073,000	
C	Pemeliharaan Kantor			426,603,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			234,032,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pemeliharaan gedung dan Bangunan	2496.0 M2	93,763	234,032,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			192,571,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali)	6.0 Unit	960,150	5,760,000	
	- Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali)	65.0 Unit	692,640	45,021,000	
	- BBM Sewa Roda 4	1.0 UT	24,500,000	24,500,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UT	24,400,000	24,400,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UT	3,000,000	6,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	4.0 UNIT	17,900,000	71,600,000	
	- Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN]	20.0 UT	219,000	4,380,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UT	690,000	2,760,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UT	750,000	4,500,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UT	730,000	3,650,000	
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor			65,188,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			24,400,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pakaian Dinas Honorer/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [35 ORG x 1 STEL]	35.0 STEL	582,858	20,400,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			40,788,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,289,167	15,470,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNPB [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	366,667	4,400,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	313,500	7,524,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	308,000	3,696,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	352,000	4,224,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	456,167	5,474,000	
E	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim			105,840,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 (REVISI XII)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(401909)
Rp. 4,805,749,000

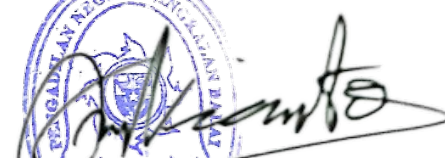
MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522141 H	Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu) - Sewa rumah dinas hakim [7 ORG x 12 BLN]	84.0 OB	1,260,000	105,840,000 105,840,000	RM
	Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding			62,896,000	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			62,896,000	
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 10 KEG]	80.0 OH	501,225	40,098,000	
I	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 10 KEG]	40.0 OK	400,000	16,000,000	RM
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 10 KEG]	40.0 OH	169,950	6,798,000	
	Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL			13,410,000	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			13,410,000	
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 5 KEG]	10.0 OK	270,000	2,700,000	RM
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]	20.0 OH	535,000	10,700,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 5 KEG]	10.0 OH	1,000	10,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 10 Desember 2024

Sekretaris



ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
NIP 197612032011011005

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(03)
(402017)
Rp. 171,800,000

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			171,800,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			171,800,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	447.0 Perkara, Berkas Perkara		143,800,000	

1049.BCA.U03	Lokasi : KAB. BANYUASIN Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	447.0 Perkara		143,800,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			58,315,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			58,315,000	
521211	Belanja Bahan			26,820,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	447.0 PKR	60,000	26,820,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			31,495,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Alat Tulis Kantor	447.0 PKR	70,459	31,495,000	
052	Penetapan hari sidang			24,600,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			24,600,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksaan)	300.0 OK	82,000	24,600,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			13,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			13,800,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			1,800,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	60.0 OK	30,000	1,800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			12,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	150.0 OK	80,000	12,000,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			17,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			17,500,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			1,500,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	50.0 OK	30,000	1,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			16,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)	200.0 OK	80,000	16,000,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			24,585,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,585,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(03)
(402017)
Rp. 171,800,000

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan			24,585,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	447.0 PKR	55,000	24,585,000	
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			3,800,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,800,000	U
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			600,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Salinan Putusan	20.0 OK	30,000	600,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3,200,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 OK	80,000	1,600,000	
	- Pemberitahuan Putusan Banding	20.0 OK	80,000	1,600,000	U
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			1,200,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,200,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			400,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 OK	80,000	400,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			800,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	5.0 OK	80,000	400,000	
	- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 OK	80,000	400,000	U
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	30.0 Orang		28,000,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				U
1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	30.0 Orang		28,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			28,000,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			28,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			28,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Honor Advokat Piket [2 ORG x 2 JAM x 7 HR x 10 BULAN	280.0 OJ	100,000	28,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 7 November 2024

KPA-KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ANDRIANTO FACHRIZAL,S.Kom

NIP 197612032011011005

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			171,800,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			171,800,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	447.0 Perkara, Berkas Perkara		143,800,000	

1049.BCA.U03	Lokasi : KAB. BANYUASIN Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	447.0 Perkara		143,800,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			71,315,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			71,315,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			21,820,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	447.0 PKR	48,815	21,820,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu)			49,495,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	447.0 PKR	110,728	49,495,000	
052	Penetapan hari sidang			600,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			600,000	7 RM
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksaan)	300.0 OK	2,000	600,000	*
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			19,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			19,800,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,800,000	RM
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	60.0 OK	30,000	1,800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			18,000,000	7 RM
	- Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	150.0 OK	120,000	18,000,000	*
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			17,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			17,500,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,500,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	50.0 OK	30,000	1,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			16,000,000	7 RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)	200.0 OK	80,000	16,000,000	*
056	Minutasi/Upaya hukum			24,585,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,585,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 (REVISI V)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(03)
(402017)
Rp. 171,800,000

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan			24,585,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
057 A	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	447.0 PKR	55,000	24,585,000	U
	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			7,800,000	
	TANPA SUB KOMPONEN			7,800,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			2,600,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Salinan Putusan	20.0 OK	130,000	2,600,000	7 RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5,200,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
058 A	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 OK	180,000	3,600,000	* U
	- Pemberitahuan Putusan Banding	20.0 OK	80,000	1,600,000	
	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			2,200,000	
	TANPA SUB KOMPONEN			2,200,000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			900,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 OK	180,000	900,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,300,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	5.0 OK	130,000	650,000	
	- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 OK	130,000	650,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	30.0 Orang		28,000,000	

1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	30.0 Orang		28,000,000	U
051 A	Pos Bantuan Hukum			28,000,000	
	TANPA SUB KOMPONEN			28,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			28,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Honor Advokat Piket [2 ORG x 2 JAM x 7 HR x 10 BULAN	280.0 OJ	100,000	28,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

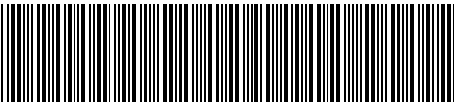
Pangkalan Balai, 10 Desember 2024

KPA-KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ANDRIANTO FACHRIZAL,S.Kom

NIP 197612032011011005



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.401909/2024

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 - 2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 - 3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 - 4. Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 - Sebesar : Rp. 3.095.749.000 (TIGA MILIAR SEMBILAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.095.749.000
005.01.WA.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 3.095.749.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	3.095.749.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN S E K A Y U (160) Rp. 3.095.749.000

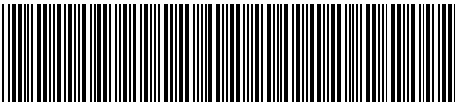
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0921-9036-3596-3002

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

						Halaman : I A. 1	
Program	:	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			3.095.749.000	
Kegiatan	:	6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			3.095.749.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)				
		2. 02	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)				
		3. 03	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)				
		4. 04	Kualitas Pelayanan Informasi Publik				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.095.749.000	
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	3.095.749.000	

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2024
I B. SUMBER DANA



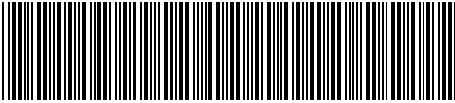
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

				Pagu		Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	3.095.749.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	3.095.749.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0921-9036-3596-3002

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Kewenangan : (KD)

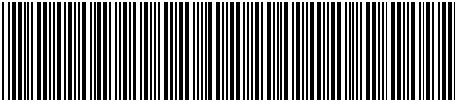
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	1.832.501	1.263.248	-	-	-	3.095.749	11 . 09	
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.832.501	1.263.248	-	-	-	3.095.749		
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	1.832.501	1.263.248	-	-	-	3.095.749		
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	1.832.501	1.263.248	-	-	-	3.095.749		
01	RM	1.832.501	1.263.248	-	-	-	3.095.749	160	
JUMLAH		1.832.501	1.263.248	-	-	-	3.095.749		

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0921-9036-3596-3002

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

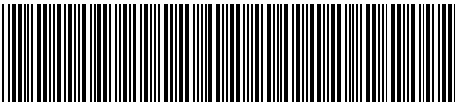
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	257.956	257.956	257.956	257.956	257.956	257.956	257.956	257.956	257.956	257.956	257.956	258.233	3.095.749
		BELANJA PEGAWAI	152.692	152.692	152.692	152.692	152.692	152.692	152.692	152.692	152.692	152.692	152.692	152.889	1.832.501
		BELANJA BARANG	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.344	1.263.248
		Dukungan Manajemen Administrasi Keseekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	257.956	257.956	257.956	257.956	257.956	257.956	257.956	257.956	257.956	257.956	257.956	258.233	3.095.749
		51 BELANJA PEGAWAI	152.692	152.692	152.692	152.692	152.692	152.692	152.692	152.692	152.692	152.692	152.692	152.889	1.832.501
	005.01.WA.6986	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.344	1.263.248

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2024
IV A. B L O K I R



DS:0921-9036-3596-3002

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

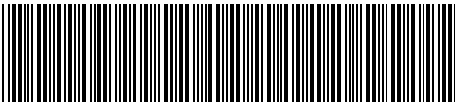
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2024
IV B. C A T A T A N



DS:0921-9036-3596-3002

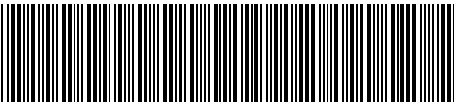
Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.402017/2024**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
- 3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
- 4. Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
- Sebesar : Rp. 171.800.000 (SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 171.800.000
Rp. 171.800.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 171.800.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN S E K A Y U (160) Rp. 171.800.000

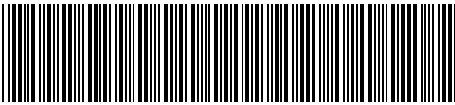
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2008-0054-9123-2643

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

							Halaman : I A. 1
Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				171.800.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				171.800.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum yang di susun				
		2. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum				
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum				
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara				
		5. 02	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu				
		6. 03	-				
		7. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	447,00	Perkara, Berkas Perkara		143.800.000
Rincian Output	:	01	BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	447.00	Perkara		143.800.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	30,00	Orang		28.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	30.00	Orang		28.000.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2024
I B. SUMBER DANA

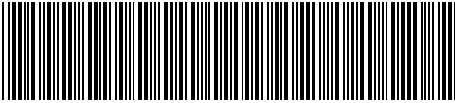


Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

				Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	171.800.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	171.800.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	
(dalam ribuan rupiah)							

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2008-0054-9123-2643

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Kewenangan : (KD)

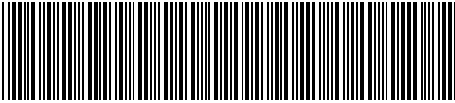
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	-	171.800	-	-	-	171.800	11 . 09	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	171.800	-	-	-	171.800		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	171.800	-	-	-	171.800		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	143.800	-	-	-	143.800		
01	RM	-	143.800	-	-	-	143.800		
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	28.000	-	-	-	28.000		
01	RM	-	28.000	-	-	-	28.000	160	
JUMLAH		-	171.800	-	-	-	171.800		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2008-0054-9123-2643

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

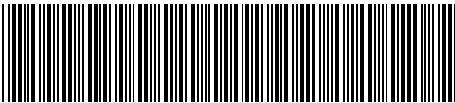
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI														
		RENCANA PENARIKAN DANA	9.240	12.141	10.409	10.614	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	37.717	171.800
		BELANJA BARANG	9.240	12.141	10.409	10.614	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	37.717	171.800
		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	9.240	12.141	10.409	10.614	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	37.717	171.800
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	9.240	12.141	10.409	10.614	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097	37.717	171.800
		PERKIRAAN PENERIMAAN	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.024	24.057
		- PNBP (425232)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	20
		- PNBP (425233)	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	280	3.250
005.03.BF.1049	- PNBP (425239)	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	1.735	20.787	

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2024
IV A. B L O K I R



DS:2008-0054-9123-2643

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

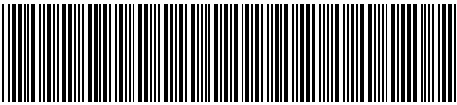
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2024
IV B. C A T A T A N



DS:2008-0054-9123-2643

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 1 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	4,805,749,000	0	4,188,605,037	539,788,559	4,728,393,596	98.39 %	77,355,404
WA Program Dukungan Manajemen	4,805,749,000	0	4,188,605,037	539,788,559	4,728,393,596	98.39 %	77,355,404
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	4,805,749,000	0	4,188,605,037	539,788,559	4,728,393,596	98.39 %	77,355,404
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,805,749,000	0	4,188,605,037	539,788,559	4,728,393,596	98.39 %	77,355,404
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,805,749,000	0	4,188,605,037	539,788,559	4,728,393,596	98.39 %	77,355,404
001 Gaji dan Tunjangan	3,442,501,000	0	3,136,587,804	255,787,247	3,392,375,051	98.54 %	50,125,949
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	3,442,501,000	0	3,136,587,804	255,787,247	3,392,375,051	98.54 %	50,125,949
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,554,892,000	0	1,424,903,000	109,027,300	1,533,930,300	98.65 %	20,961,700
000001. Belanja Gaji Pokok PNS	1,335,202,000	0	1,208,282,800	109,027,300	1,317,310,100	98.66 %	17,891,900
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	108,495,000	0	108,430,400	0	108,430,400	99.94 %	64,600
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	108,195,000	0	108,189,800	0	108,189,800	100.00	5,200
000004. Tambahan Kenaikan Gaji	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	26,000	0	19,827	1,226	21,053	80.97 %	4,947
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,000	0	15,977	1,226	17,203	78.20 %	4,797
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	2,000	0	1,918	0	1,918	95.90 %	82
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	2,000	0	1,932	0	1,932	96.60 %	68
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	113,378,000	0	98,259,380	7,487,910	105,747,290	93.27 %	7,630,710
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	98,514,000	0	83,396,930	7,487,910	90,884,840	92.26 %	7,629,160
000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	7,129,000	0	7,128,150	0	7,128,150	99.99 %	850
000010. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	7,735,000	0	7,734,300	0	7,734,300	99.99 %	700
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	31,548,000	0	29,104,644	2,211,066	31,315,710	99.26 %	232,290
000011. Belanja Tunj. Anak PNS	27,063,000	0	24,637,544	2,211,066	26,848,610	99.21 %	214,390
000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	2,220,000	0	2,219,652	0	2,219,652	99.98 %	348
000013. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	2,265,000	0	2,247,448	0	2,247,448	99.23 %	17,552
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	0	26,130,000	2,010,000	28,140,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 2 dari 6

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS	24,120,000	0	22,110,000	2,010,000	24,120,000	100.00	0
	000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	100.00	0
	000016. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,186,640,000	0	1,084,410,000	102,170,000	1,186,580,000	99.99 %	60,000
	000017. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,019,850,000	0	917,670,000	102,170,000	1,019,840,000	100.00	10,000
	000018. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	83,395,000	0	83,370,000	0	83,370,000	99.97 %	25,000
	000019. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	83,395,000	0	83,370,000	0	83,370,000	99.97 %	25,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	131,080,000	0	121,557,705	4,268,837	125,826,542	95.99 %	5,253,458
	000020. Belanja Tunjangan PPh PNS	84,638,000	0	75,165,445	4,268,837	79,434,282	93.85 %	5,203,718
	000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	23,291,000	0	23,283,613	0	23,283,613	99.97 %	7,387
	000022. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	23,151,000	0	23,108,647	0	23,108,647	99.82 %	42,353
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	82,056,000	0	76,258,260	5,793,600	82,051,860	99.99 %	4,140
	000023. Belanja Tunj Beras PNS	82,056,000	0	76,258,260	5,793,600	82,051,860	99.99 %	4,140
511129	Belanja Uang Makan PNS	241,982,000	0	212,618,000	17,741,000	230,359,000	95.20 %	11,623,000
	000024. Belanja Uang Makan PNS	241,982,000	0	212,618,000	17,741,000	230,359,000	95.20 %	11,623,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	15,180,000	0	13,495,000	1,095,000	14,590,000	96.11 %	590,000
	000025. Belanja Tunjangan Umum PNS	13,360,000	0	11,675,000	1,095,000	12,770,000	95.58 %	590,000
	000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	910,000	0	910,000	0	910,000	100.00	0
	000027. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	910,000	0	910,000	0	910,000	100.00	0
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	40,494,000	0	37,164,400	2,858,800	40,023,200	98.84 %	470,800
	000028. Belanja Gaji Pokok PPPK	34,776,000	0	31,446,800	2,858,800	34,305,600	98.65 %	470,400
	000029. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2,859,000	0	2,858,800	0	2,858,800	99.99 %	200
	000030. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2,859,000	0	2,858,800	0	2,858,800	99.99 %	200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,000	0	1,128	88	1,216	13.51 %	7,784
	000031. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	0	968	88	1,056	15.09 %	5,944
	000032. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,000	0	80	0	80	8.00 %	920

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 3 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000033. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,000	0	80	0	80	8.00 %	920
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	134,000	0	0	0	0	0.00 %	134,000
000034. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000
000035. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13)	64,000	0	0	0	0	0.00 %	64,000
000036. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)	64,000	0	0	0	0	0.00 %	64,000
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	20,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000
000037. Belanja Tunjangan Anak PPPK	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000038. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
000039. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	0	4,550,000	350,000	4,900,000	100.00	0
000040. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,200,000	0	3,850,000	350,000	4,200,000	100.00	0
000041. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00	0
000042. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,622,000	0	941,460	72,420	1,013,880	27.99 %	2,608,120
000043. Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,476,000	0	796,620	72,420	869,040	25.00 %	2,606,960
000044. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	73,000	0	72,420	0	72,420	99.21 %	580
000045. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	73,000	0	72,420	0	72,420	99.21 %	580
511628 Belanja Uang Makan PPPK	8,400,000	0	7,175,000	700,000	7,875,000	93.75 %	525,000
000046. Belanja Uang Makan PPPK	8,400,000	0	7,175,000	700,000	7,875,000	93.75 %	525,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,363,248,000	0	1,052,017,233	284,001,312	1,336,018,545	98.00 %	27,229,455
002.0A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	476,781,000	0	374,258,400	101,918,300	476,176,700	99.87 %	604,300
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	418,463,000	0	352,537,400	65,892,300	418,429,700	99.99 %	33,300
000047. Honorarium Sopir	44,196,000	0	36,830,000	7,366,000	44,196,000	100.00	0
000048. Honorarium Satpam	88,392,000	0	73,660,000	14,732,000	88,392,000	100.00	0
000049. Honorarium Pramubakti	200,880,000	0	167,400,000	33,480,000	200,880,000	100.00	0
000050. THR Sopir	3,683,000	0	3,683,000	0	3,683,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 4 dari 6

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000051. THR Satpam	7,366,000	0	7,366,000	0	7,366,000	100.00	0
	000052. THR Pramubakti	16,740,000	0	16,740,000	0	16,740,000	100.00	0
	000053. KEPERLUAN ALAT RUMAH TANGGA KANTOR	57,206,000	0	46,858,400	10,314,300	57,172,700	99.94 %	33,300
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	58,318,000	0	21,721,000	36,026,000	57,747,000	99.02 %	571,000
	000054. Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	58,318,000	0	21,721,000	36,026,000	57,747,000	99.02 %	571,000
002.0B	Langganan Daya dan Jasa	212,530,000	0	209,905,737	1,989,290	211,895,027	99.70 %	634,973
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	189,000,000	0	189,000,000	0	189,000,000	100.00	0
	000055. Lisensi Vidio Conference	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
	000056. Langganan Internet	186,000,000	0	186,000,000	0	186,000,000	100.00	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,400,000	0	884,500	322,000	1,206,500	86.18 %	193,500
	000057. Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	1,400,000	0	884,500	322,000	1,206,500	86.18 %	193,500
522112	Belanja Langganan Telepon	10,979,000	0	9,715,737	931,290	10,647,027	96.98 %	331,973
	000058. Langganan telpon	10,979,000	0	9,715,737	931,290	10,647,027	96.98 %	331,973
522113	Belanja Langganan Air	7,078,000	0	6,239,500	736,000	6,975,500	98.55 %	102,500
	000059. Langganan Air	7,078,000	0	6,239,500	736,000	6,975,500	98.55 %	102,500
522141	Belanja Sewa	4,073,000	0	4,066,000	0	4,066,000	99.83 %	7,000
	000060. Langganan Web Hosting	4,073,000	0	4,066,000	0	4,066,000	99.83 %	7,000
002.0C	Pemeliharaan Kantor	426,603,000	0	277,552,835	144,624,473	422,177,308	98.96 %	4,425,692
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	234,032,000	0	115,909,000	117,170,366	233,079,366	99.59 %	952,634
	000061. Pemeliharaan gedung dan Bangunan	234,032,000	0	115,909,000	117,170,366	233,079,366	99.59 %	952,634
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	192,571,000	0	161,643,835	27,454,107	189,097,942	98.20 %	3,473,058
	000062. Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali)	5,760,000	0	2,442,000	3,300,000	5,742,000	99.69 %	18,000
	000063. Perawatan Laptop	3,650,000	0	2,550,000	1,000,000	3,550,000	97.26 %	100,000
	000064. Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali)	45,021,000	0	43,632,200	1,350,000	44,982,200	99.91 %	38,800
	000065. BBM Sewa Roda 4	24,500,000	0	20,449,630	3,250,000	23,699,630	96.73 %	800,370
	000066. Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat)	24,400,000	0	21,077,870	3,310,955	24,388,825	99.95 %	11,175

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 5 dari 6

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000067. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua)	6,000,000	0	5,556,331	356,352	5,912,683	98.54 %	87,317
	000068. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	71,600,000	0	63,682,104	7,686,800	71,368,904	99.68 %	231,096
	000069. Perawatan Komputer	4,380,000	0	1,653,700	2,600,000	4,253,700	97.12 %	126,300
	000070. Perawatan Printer	2,760,000	0	600,000	2,000,000	2,600,000	94.20 %	160,000
	000071. Perawatan AC	4,500,000	0	0	2,600,000	2,600,000	57.78 %	1,900,000
002.0D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	65,188,000	0	56,162,000	8,992,000	65,154,000	99.95 %	34,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	24,400,000	0	23,200,000	1,200,000	24,400,000	100.00	0
	000072. Pakaian Dinas Honorer/pegawai tidak tetap	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
	000073. Pakaian Dinas Pegawai	20,400,000	0	19,200,000	1,200,000	20,400,000	100.00	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	40,788,000	0	32,962,000	7,792,000	40,754,000	99.92 %	34,000
	000074. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	15,470,000	0	12,818,000	2,652,000	15,470,000	100.00	0
	000075. Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNBP	4,400,000	0	3,512,000	856,000	4,368,000	99.27 %	32,000
	000076. Honorarium Pengelola Keuangan	7,524,000	0	6,384,000	1,140,000	7,524,000	100.00	0
	000077. Honorarium Bendahara	3,696,000	0	3,080,000	616,000	3,696,000	100.00	0
	000078. Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM	4,224,000	0	3,520,000	704,000	4,224,000	100.00	0
	000079. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG	5,474,000	0	3,648,000	1,824,000	5,472,000	99.96 %	2,000
002.0E	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	105,840,000	0	84,420,000	13,860,000	98,280,000	92.86 %	7,560,000
522141	Belanja Sewa	105,840,000	0	84,420,000	13,860,000	98,280,000	92.86 %	7,560,000
	000080. Sewa rumah dinas hakim	105,840,000	0	84,420,000	13,860,000	98,280,000	92.86 %	7,560,000
002.0H	Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding	62,896,000	0	40,018,261	9,237,249	49,255,510	78.31 %	13,640,490
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62,896,000	0	40,018,261	9,237,249	49,255,510	78.31 %	13,640,490
	000081. Uang Harian	40,098,000	0	28,090,000	3,310,000	31,400,000	78.31 %	8,698,000
	000082. Transportasi	16,000,000	0	8,952,261	4,307,789	13,260,050	82.88 %	2,739,950
	000083. Penginapan	6,798,000	0	2,976,000	1,619,460	4,595,460	67.60 %	2,202,540
002.0I	Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL	13,410,000	0	9,700,000	3,380,000	13,080,000	97.54 %	330,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 6 dari 6

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,410,000	0	9,700,000	3,380,000	13,080,000	97.54 %	330,000
	000084. Transportasi	2,700,000	0	1,660,000	720,000	2,380,000	88.15 %	320,000
	000085. Uang Harian	10,700,000	0	8,040,000	2,660,000	10,700,000	100.00	0
	000086. Penginapan	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Januari 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	150,390,000	26,820,000	0	0	0	0.00 %	123,570,000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	150,390,000	26,820,000	0	0	0	0.00 %	123,570,000
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	150,390,000	26,820,000	0	0	0	0.00 %	123,570,000
BCA Perkara Hukum Perseorangan	122,390,000	26,820,000	0	0	0	0.00 %	95,570,000
BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	122,390,000	26,820,000	0	0	0	0.00 %	95,570,000
051 Pendaftaran Berkas Perkara	48,985,000	0	0	0	0	0.00 %	48,985,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	48,985,000	0	0	0	0	0.00 %	48,985,000
521211 Belanja Bahan	6,705,000	0	0	0	0	0.00 %	6,705,000
000001. Penjilitan berkas perkara	6,705,000	0	0	0	0	0.00 %	6,705,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	42,280,000	0	0	0	0	0.00 %	42,280,000
000002. Alat Tulis Kantor	42,280,000	0	0	0	0	0.00 %	42,280,000
052 Penetapan hari sidang	35,760,000	26,820,000	0	0	0	0.00 %	8,940,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	35,760,000	26,820,000	0	0	0	0.00 %	8,940,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,760,000	26,820,000	0	0	0	0.00 %	8,940,000
000003. Pengiriman Surat Penetapan Hari Sidang	35,760,000	26,820,000	0	0	0	0.00 %	8,940,000
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	2,400,000	0	0	0	0	0.00 %	2,400,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,400,000	0	0	0	0	0.00 %	2,400,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	0	0	0	0	0.00 %	2,400,000
000004. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	2,400,000	0	0	0	0	0.00 %	2,400,000
054 Pemeriksaan di sidang pengadilan	20,940,000	0	0	0	0	0.00 %	20,940,000
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	20,940,000	0	0	0	0	0.00 %	20,940,000
521211 Belanja Bahan	20,940,000	0	0	0	0	0.00 %	20,940,000
000005. Konsumsi Makan Terdakwa	8,940,000	0	0	0	0	0.00 %	8,940,000
000006. Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	12,000,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000,000
055 Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	2,400,000	0	0	0	0	0.00 %	2,400,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Januari 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,400,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,400,000
000007. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	2,400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,400,000
056 Minutasi/Upaya hukum	6,705,000	0	0	0	0	0 0.00 %	6,705,000
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	6,705,000	0	0	0	0	0 0.00 %	6,705,000
521211 Belanja Bahan	6,705,000	0	0	0	0	0 0.00 %	6,705,000
000008. Penjilitan Berkas Perkara	6,705,000	0	0	0	0	0 0.00 %	6,705,000
057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	4,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	4,000,000
057.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	4,000,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,400,000
000009. Pengiriman Berkas Banding	800,000	0	0	0	0	0 0.00 %	800,000
000010. Pengiriman Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	800,000	0	0	0	0	0 0.00 %	800,000
000011. Pengiriman Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	800,000	0	0	0	0	0 0.00 %	800,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,600,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,600,000
000012. Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	800,000	0	0	0	0	0 0.00 %	800,000
000013. Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	800,000	0	0	0	0	0 0.00 %	800,000
058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	1,200,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,200,000
058.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,200,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,200,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,200,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,200,000
000014. Pengiriman Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	400,000
000015. Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	400,000
000016. Pengiriman Proses Kasasi/PK/Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	400,000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	28,000,000
QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	28,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	28,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Januari 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051 Pos Bantuan Hukum	28,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	28,000,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	28,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	28,000,000
522131 Belanja Jasa Konsultan	28,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	28,000,000
000017. Honorarium Advokat Piket	28,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	28,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Kelurahan Mulya Agung, Kecamatan Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5723 669

Nomor : 1016 /SEK.01.W6-U10/RA.1.8/XI/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Penyusunan dan Telaah Anggaran 2024

Pangkalan Balai, 07 November 2023

Kepada Yth.
Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Pidana
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
di-

Tempat

Dengan ini kami mengundang Bapak untuk mengikuti "**Rapat Penyusunan dan Telaah Anggaran 2024**" yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/8 November 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang kerja Sekretaris

Demikian di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasub Perencanaan, Ti dan Pelaporan

MUHAMMAD IMAN SEPTIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuwasin, Kelurahan Mulya Agung, Kecamatan Banyuwasin III
Kabupaten Banyuwasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fnx : (0711) 5723 669

BAHASAN MATERI RAPAT

KASUB PTIP

1. Beberapa alokasi anggaran pada Peningkatan manajemen peradilan Umum (1049) harus dioptimalkan karena ada beberapa anggaran yang minim seperti, penggandaan dan penjilitan, alat tulis kantor, dll
2. Menetapkan dan menyesuaikan rencana penarikan dana atau halaman III Dipa
3. Perlu adanya penambahan mata anggaran air minum dan pemeliharaan

Sekretaris/KPA

1. Agar segera disesuaikan dan dilakukan revisi dipa dan halaman III dipa
2. Perlu dihitung secara sistematis anggaran pemeliharaan gedung kantor
3. Untuk memperhitungkan secara matang tentang belanja 51 (gaji pegawai)

Panitera

1. Untuk mengusulkan mata anggaran Prodeo dan KIMWASMAT di tahun 2024 dikarenakan pada sebelumnya anggaran tersebut selalu tidak ada

TANDA TANGAN

Notulen

Mengetahui Sekretaris/ KPA

MUHAMMAD IMAN SEPTIAN

ANDRIANTO FACHRIZAL

Rapat Penyusunan dan Telaah Anggaran Tahun 2024

DAFTAR ABSEN

Rapat Pembahasan Rapat Pembahasan Rencana Anggaran

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

HARI / TANGGAL : Rabu / 8 November 2023

PUKUL : 10.00 WIB

No.	NAMA	GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	Andrianto F NIP. 197420320101005	III.d	Sek		
2.	W. S. N. NIP. 197009041996031002	II.d	Penitip		
3.	K. H. M. NIP.	IV/d	PPA		
4.	M. H. M. S. NIP. 198501011990031002	IV/d	PTU		
5.	NIP.				
6.	NIP.				
7.	NIP.				

Mengetahui,
Sekretaris /KPA
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai


ANDRIANTO FACHRIZAL



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Kelurahan Mulya Agung, Kecamatan Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5723 669

Nomor : 1012 /SEK.01.W6-U10/RA.1.8/XI/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Penyusunan dan Telaah Anggaran 2024

Pangkalan Balai, 09 November 2023

Kepada Yth.
KPN, WKPN, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Pidana
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
di-

Tempat

Dengan ini kami mengundang Bapak untuk mengikuti "**Rapat Penyusunan dan Telaah Anggaran 2024**" yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/13 November 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai : Ruang Kerja
Tempat : Kerja Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Demikian di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasub Perencanaan, Ti dan Pelaporan

MUHAMMAD IMAN SEPTIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuwasin, Kelurahan Mulya Agung, Kecamatan Banyuwasin III
Kabupaten Banyuwasin 30911

Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fnx : (0711) 5723 669

BAHASAN MATERI RAPAT

KETUA

1. Banhawasnya anggaran BBM dan pemeliharaan masih dinilai kurang, agar segera melakukan ABT apabila pagu 2024 sudah muncul
2. agar mengantisipasi perjalanan dinas dan BBM kendaraan roda 4 (empat)
3. untuk dipa 03, kimwasmata dan prodeo tidak muncul, segera melakukan koordinasi dengan PT. Palembang

Sekretaris/KPA

1. Agar anggaran yang ada nantinya haruslah terserap dengan baik dan sesuai rencana penarikannya
2. anggaran BBM masih sangatlah kurang segera revisi apabila memungkinkan

Panitera

1. Untuk mengusulkan mata anggaran Prodeo dan KIMWASMAT di tahun 2024 dikarenakan pada sebelumnya anggaran tersebut selalu tidak ada

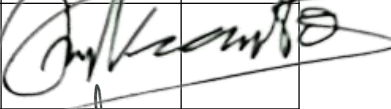


Rapat Penyusunan dan Telaah Anggaran Tahun 2024

**DAFTAR ABSEN RAPAT EVALUASI SIPP
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

HARI / TANGGAL : SENIN / 13 November 2023

PUKUL : 10.00 WIB

No.	NAMA	GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H. NIP.19781125 200212 2 002	IV.a	Ketua		
2.	Fitri Agustina, S.H NIP. 19790825 20060 4 2 002.	IV.a	Wakil		
3.	Warno, S.H NIP. 19670904 199103 1 002	III.d	Panitera		
4.	Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. 19790914 200502 1 001	III.d	Panmud Pidana		
5.	Andrianto Fachrizal, S. Kom NIP. 19761203 201101 1 005	III.d	Sekretaris		
6.	Muhammad Iman Septian S.Ip NIP. 19850921 201101 1 011	III.d	PTIP		



Mengetahui,
SEKRETARIS


ANDRIANTO FACHRIZAL



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5723 669

Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Pangkalan Balai, 13 Desember 2023

Yth. **Seluruh Hakim, Pegawai dan PPNPN**
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
di-
Tempat

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu agar dapat hadir dalam "**Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja**" yang akan dilaksanakan pada :

pada hari, tanggal : Kamis/14 Desember 2023
waktu : pukul 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Demikianlah ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,

Nofita Dwi Wahyuni



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5723 669

NOTULA

Dasar : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Desember 2023
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Acara : Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan
Peserta Rapat : 1. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
3. Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana dan PPNPN Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Jalannya Rapat :

Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melaksanakan Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, diikuti oleh seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyampaikan bahwa dalam menentukan target yang akan dicapai perlu adanya kerjasama antar bagian dalam pengelolaan data dan penyusunan untuk menghasilkan Perjanjian Kinerja Tahunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nama Notulis,

Mutiara Saputri
NIP. 199603222019032007



Mengetahui,
Ketua
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,

Nofita Dwi Wahyuni
NIP. 197811252002122002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5723 669



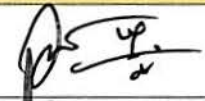
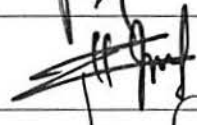
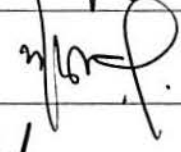
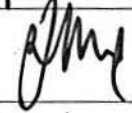
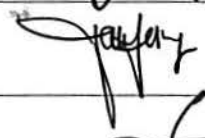
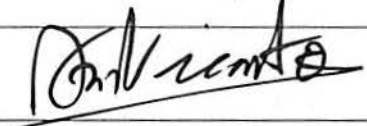
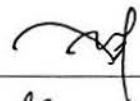
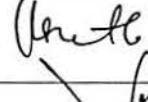
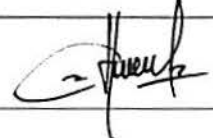
Dok. Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan, 14 Desember 2023

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin pn-pangkalanbalai@gmail.com pn.pangkalanbalai@gmail.com	Nomor	:	W6.U10/ /TAPM/MR/DP-AI/II/2023
		Tanggal Pembuatan	:	10 Desember 2018
		Tanggal Revisi	:	15 Februari 2023
		Tanggal Efektif	:	15 Februari 2023
		Disahkan oleh	:	KPN Pangkalan Balai
		DAFTAR HADIR		

HARI/TANGGAL : Kamis/ Desember 2023

TEMPAT : Aula Prof. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. PN Pangkalan Balai

AGENDA : Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Mofika Dwi Wahyuni	Ketua	
2	Fetri Agudina	Wakil Ketua	
3	Hani Muktiyono	Hakim	
4	Gylenka Yana	Hakim	
5	Ayu Cahyuni Lirait	Hakim	
6	Erwin T.S. Mander	Hakim	
7	Ajengna	Hakim	
8		Panitera	
9	Andrianbo F.	Sekretaris	
10		Panmudpp	
11	Isnata Taksoni	PP	
12	A-HAIRUN Y	Panmudpp	
13	KHOIRUL MUNAWAR	PANMUDPP	
14	Den Anggita	staf	
15	Kary S	PP	
16	Judi AS	PP	

17	Mahmudah	staf	ms
18	Wahid Sughe	seaf	ps
19	M. muh an	ptk	su
20	Ilham P. Manggi	Staf	Staf
21	Endang Azhari	Staf	Staf
22	AL IHSAN ALAMSYUR	PP	PP
23	Mardiyah Fikri	Staf	Staf
24	Mufpan A. R. R. R.	Staf	Staf
25	M. R. R. R.	Staf	Staf
26	ERWANZA	PPNPN	PPNPN
27	M. Nouval Dwi Aditya	PPNPN	PPNPN
28	Riska Yanti	PPNPN	PPNPN
29	Alra Puspitasari	PPNPN	PPNPN
30	Mutiarni	kepegawisan	kepegawisan
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

41			
42			
43			
44			
45			



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5723 669

Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Pangkalan Balai, 13 Desember 2023

Yth. **Seluruh Hakim, Pegawai dan PPNPN**
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
di-
Tempat

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu agar dapat hadir dalam "**Penetapan dan Sosialisasi Program Kerja 2024**" yang akan dilaksanakan pada :

pada hari, tanggal : Kamis/14 Desember 2024
waktu : pukul 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Demikianlah ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,

Nofita Dwi Wahyuni



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5723 669

NOTULA

Dasar : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Desember 2023
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Acara : Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan
Peserta Rapat : 1. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
3. Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana dan PPNPN Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Jalannya Rapat :

Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melaksanakan Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyampaikan bahwa dalam menentukan target yang akan dicapai perlu adanya kerjasama antar bagian dalam pengelolaan data dan penyusunan untuk menghasilkan Perjanjian Kinerja Tahunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nama Notulis,

Mutiara Saputri
NIP. 199603222019032007



Mengetahui,
Ketua
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,

Nofita Dwi Wahyuni
NIP. 197811252002122002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5723 669



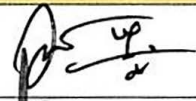
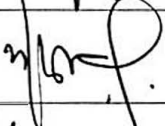
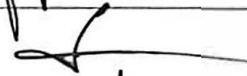
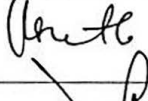
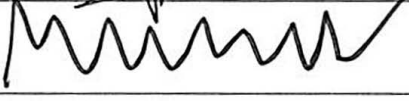
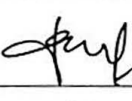
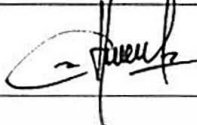
Dok.

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin pn-pangkalanbalai@gmail.com pn.pangkalanbalai@gmail.com	Nomor	:	W6.U10/ /TAPM/MR/DP-AI/II/2023
		Tanggal Pembuatan	:	10 Desember 2018
		Tanggal Revisi	:	15 Februari 2023
		Tanggal Efektif	:	15 Februari 2023
		Disahkan oleh	:	KPN Pangkalan Balai
DAFTAR HADIR				

HARI/TANGGAL : Kamis/ Desember 2023

TEMPAT : Aula Prof. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. PN Pangkalan Balai

AGENDA : Penetapan dan Sosialisasi Program Kerja 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Mofika Dwi Wahyuni	Ketua	
2	Fitri Agustina	Wakil Ketua	
3	Hani Muktiyono	Hakim	
4	Gylenka Yana	Hakim	
5	Ayu Cahyuni Erat	Hakim	
6	Erwin T.S. Mander	Hakim	
7	Ajengna	Hakim	
8		Panitera	
9	Andrianb F.	Sekretaris	
10		Panmudpp	
11	Isnata Taksoni	PP	
12	A-HALPIN Y	Panmudpp	
13	KHOIRUL MUNAWAR	PANMUDPP	
14	Dea Anggita	staf	
15	Kary S	PP	
16	Judi AS	PP	

17	Mahmudah	staf	ms
18	Wahida Syah	seaf	ps
19	M. muh an	ptk	su
20	Ilham P. Manggi	staf	si
21	Endang Azhari	staf	galy
22	AL IHSAN ALAMSYUR	pp	ku
23	Mardiyah Fikri	guru	si
24	Mufpan A. R. S. H.	staf	si
25	M. R. S. H.	js	si
26	ERWANZA	PPNPN	As
27	M. Nouval Dwi Aditya	PPNPN	Dem
28	Riska Yanti	PPNPN	Ruli
29	Alra Puspitasari	PPNPN	Chen
30	Mutiarni	kepegawisan	Muf
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

41			
42			
43			
44			
45			



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5723 669

Nomor : 1545/WKPN.W6-U10/UND.OT1.6/XII/2024 Pangkalan Balai, 16 Desember 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. **Seluruh Hakim, Pegawai dan PPNPN**
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
di-
Tempat

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu agar dapat hadir dalam "**Rapat Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2024**" yang akan dilaksanakan pada :

pada hari, tanggal : Kamis/19 Desember 2024
waktu : pukul 08.30 WIB s.d. selesai
tempat : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Demikianlah ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,

FITRI AGUSTINA



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5723 669

NOTULA

Dasar : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Desember 2024
Pukul : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2024
Peserta Rapat : 1. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
3. Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana dan PPNPN Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Jalannya Rapat :

Rapat Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2024 dimulai pada pukul 08.30 WIB di Aula Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Acara dibuka dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung dan mengumandangkan yel-yel.

Rapat Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2024 dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kembali melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait PERMA 7 Tahun 2016, PERMA 8 Tahun 2016, PERMA 9 Tahun 2016 dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menghimbau untuk mematuhi dan mempedomani peraturan-peraturan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mencoreng nama baik institusi. Selain itu diharapkan agar Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjalankan instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Palembang terkait disiplin absen manual dan finger print serta absensi online pada SIKEP. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 pada hari Jum'at batas pelaksanaan absensi kehadiran pukul 07.30 WIB dan absensi pulang dibuka pukul 16.30 WIB. Selain kedisiplinan, setiap aparat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga harus tetap berintegritas dalam melaksanakan tupoksi masing-masing dengan baik dan apabila terdapat kendala agar disampaikan/ditanyakan kepada atasan.

Ibu Fitri Agustina selaku Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyampaikan bahwa integritas itu harus dijaga. Kerja keras, kerja cerdas dan ikhlas. Agar diperhatikan perilaku dan sikap dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara untuk menghindari prasangka buruk dari pihak lawan atau masyarakat, kemudian jangan menjanjikan terlaksananya eksekusi atas suatu perkara kepada pihak manapun. Agar diperhatikan pula terkait tertib rumah tangga. Pelaporan terkait gratifikasi/pemberian agar dilakukan, serta jadikan tempat kerja yang aman, saling menjaga dan mengingatkan antar pegawai.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5723 669

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga menyampaikan bahwa apabila ada yang mengaku sebagai keluarga beliau yang menanyakan/menyampaikan hal-hal terkait suatu perkara agar tidak ditanggapi. Agar Sekretaris menyampaikan pula kepada pegawai harian lepas, Pol PP dan *cleaning service* untuk tidak berhubungan dengan orang/pihak terkait dengan perkara.

Hakim Pengawas bidang Kepaniteraan Perdata menyampaikan bahwa, Buku Register sudah dibagi namun belum terisi oleh Petugas. Buku hak-hak Kepaniteraan untuk Desember belum ada, kemudian perkara gugatan ada yang masuk namun belum dicatatkan dikarenakan penggugatnya banyak namun hanya tercatat satu di e-count. Serta disampaikan pula bahwa printer kasir mengalami kendala/kerusakan.

Hakim Pengawas bidang Kepaniteraan Pidana menyampaikan bahwa, Register Induk Pidana yang belum ditulis telah ditindaklanjuti. Serta diharapkan koordinasi antar bidang, terdapat keluhan bahwa bagian Pidana tetap menjemput bola terkait laporan berkas diterima dan dimohon kerjasamanya untuk Juru Sita agar tertib dalam penyampaian tanda terima berkas.

Terkait Register, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyampaikan bahwa pengisian register yang tidak sesuai dengan SOP termasuk pelanggaran kinerja. Untuk Jurusita diharapkan tidak maladministrasi dan Panitera agar melakukan pengawasan.

Selanjutnya yaitu Ibu Vivi Indrasusi Siregar selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyampaikan bahwa untuk Panitera agar memperhatikan lagi terkait tugas Jurusita. Diharapkan dalam dua minggu ini agar dapat menyelesaikan Register. Hak-Hak Kepaniteraan agar segera dikerjakan *real tim* pada hari tersebut untuk menghindari kesalahan.

Kemudian Bapak Binal Hakim selaku Panitera menyampaikan bahwa ia akan melakukan koordinasi kepada Panitera Pengganti dan Jurusita terkait tugas pokok dan fungsi.

Kemudian Hakim Pengawas bidang Kepaniteraan Hukum menyampaikan bahwa, lemari Arsip sudah penuh dan tidak ada lagi ruang untuk berkas dan ini sudah ditindaklanjuti dengan dimasukkan ke anggaran. Lampu di Ruang Hukum mati dan dimohon untuk bagian Umum agar dapat segera ditindaklanjuti. Kemudian terkait AC di Ruang Hukum yang mengalami kebocoran, wallpaper yang sudah mengelupas dan jika ada pengadaan komputer baru, agar dapat dipertimbangkan mengalokasikan satu komputer untuk Ruang Hukum dikarenakan komputer pada ruang arsip masih terdapat kendala.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyampaikan kepada Sekretaris agar dapat menindaklanjuti terkait kekurangan lemari arsip. Beberapa permasalahan kantor agar dapat segera ditindaklanjuti agar tidak mengakibatkan pembengkakan biaya perbaikan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5723 669

Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan menyampaikan terkait kerusakan kompresor, untuk jangka pendek ada beberapa ruangan yang ditutup akses AC-nya agar tidak membebani kerja kompresor di lantai 1. Kemudian kendaraan roda 4 ada yang tidak dapat dioperasikan dan satu unit akan dilakukan penghapusan BMN.

Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Bapak Andrianto Fachrizal menyampaikan terkait belanja modal untuk *sparepart*. Kemudian terkait konsultasi ke Pengadilan Tinggi Palembang, mobil Nissan X-Trail sudah dikonsultasikan ke KPKNL Palembang dan mereka menyampaikan bahwa bisa menggunakan anggaran lain akan tetapi sejenis untuk kendaraan.

Kemudian untuk peralatan dari Mahkamah Agung RI seperti *scanner* dan *printer* itu ada 4 buah *scanner*, 1 buah untuk didistribusikan kepada Panitera Pengganti untuk pengunggahan BA, 1 buah untuk Kepaniteraan Hukum, 1 buah untuk Kepaniteraan Perdata dan 1 buah belum dialokasikan, kemudian 1 buah Printer untuk Kepaniteraan Hukum dan 1 buah untuk Kepaniteraan Pidana.

Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, menyampaikan terkait Absen PHL, untuk Pol PP agar lebih rapi dan tertib dalam pengisian absen.

Hakim Pengawas Bidang Perencanaan Informasi Teknologi dan Pelaporan, menyampaikan tentang perubahan terkait anggaran, ada beberapa mata anggaran di Tahun 2025 yang tidak ada di Tahun 2024 seperti pengisian air galon dan pemeliharaan genset. Kemudian untuk DIPA 03 Tahun 2025, masuk lagi anggaran senilai Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah). Pelaporan PTIP dan dokumen lainnya sudah mulai disusun dan dikerjakan, namun SK Tim Penyusun SAKIP, LAKIP dan Renstra belum ada.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyampaikan bahwa seluruh dokumen surat keputusan agar dapat diselesaikan.

Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyampaikan bahwa realisasi DIPA 01 sebesar 97,8% dan DIPA 03 sebesar 96%. Selain itu, beliau menyampaikan bahwa tahun depan sudah tidak ada lagi pengiriman laporan sidang melalui POS.

Hakim Pengawas SIPP menyampaikan bahwa pada bulan November Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berada pada peringkat 2 se-Sumatera Selatan dan peringkat 4 se-Indonesia. Terdapat kendala seperti kontra memori PK muncul ketidaksesuaian. Verifikasi dokumen elektronik ada sepuluh yang tidak sesuai karena persidangan ditunda, serta penginputan perkara BHT namun masih dalam waktu tenggang 14 hari sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian pada pengarsipan di EIS.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyampaikan bahwa terkait BHT agar jangan segera di BHT karena belum masuk tenggang waktu.

f.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5723 669

Hakim Pengawas PTSP menyampaikan terkait Mall Pelayanan Publik yang terdapat di OPI Mall, CGC dan di Perkantoran Pemkab Banyuasin dirasa kurang efektif karena selama ini terhitung sejak beroperasi hanya terdapat tujuh orang pengunjung. Foto uraian jobdesk yang ada pada meja PTSP agar disamakan agar terlihat rapi dan tertib.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyampaikan bahwa Sekretaris agar melakukan sosialisasi terkait PTSP. Briefing PTSP dimulai dengan doa dan dihadiri oleh penanggung jawab PTSP, seragam harus disepakati jangan berwarna-warni, Buku Pengawasan PTSP agar dibuat. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat bersurat ke BRI untuk menjadi narasumber untuk sosialisasi terkait pelayanan prima.

Terakhir Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, menyampaikan untuk PTSP harus menggunakan seragam yang sama, Petugas PTSP *standby*/bersiaga di tempat karena pengawasan CCTV Badilum dimulai pada pagi hari pukul 08.00 WIB , siang hari pada pukul 13.00 WIB dan sore hari pada pukul 15.00 WIB menjelang pulang kantor.

Nama Notulis,

Mutiara Saputri
NIP. 199603222019032007



Mengetahui,
Ketua
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,

Fitri Agustina
NIP. 197908252006042002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5723 669





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5723 669



Dok. Rapat Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2024, 19 Desember 2024



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5252 010

DAFTAR ABSEN HADIR
RAPAT EVALUASI KINERJA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
BULAN DESEMBER TAHUN 2024

HARI/TANGGAL : KAMIS/19 -12-2024
PUKUL : 08.30 WIB s.d. SELESAI
TEMPAT : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	Fitri Agustina	Ketua		
2.	Vivi Siregar	WkPN		
3.	Hani Muktiyono	Hakim		
4.	Syahrizki Yanti	Hakim		
5.	Ayu Cahyani Satri	Hakim		
6.	Bismil Haldi	Panitera		
7.	Andhianto R.	Sekretaris		
8.	Rahmat Juniansyah	Kasubag Umum & Keu		
9.	Pramusi Wibobo	Stat		
10.	M. Bismil Haldi	PP		
11.	Hikmahwati	PP		
12.	Mathyas Adnata	PP		
13.	Benny	PP		
14.	Melly N	PP		



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5252 010

15.	Endang Asihani	Staf	Spring	
16.	Yudi AS	PP	G. Gun	
17.	Ignata Takasuri	PP	butir	
18.	Berry H.	Panmud P&T.	En	
19.	KHOIRUL MUNAWAR	PANMUD P I DANA	MW	
20.	zulpan Arxunto	Staf	D	
21.	Muhma	keper Tobala	Mf	
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5252 010

32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5723 669

Nomor : 21 /KPN.W6-U10/UND.OT1.6/X/2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Undangan

Pangkalan Balai, 16 Oktober 2024

Yth. **Seluruh Hakim, Pegawai dan PPNPN**
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
di-
Tempat

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu agar dapat hadir dalam "**Rapat Evaluasi Bulanan**" yang akan dilaksanakan pada :

pada hari, tanggal : Kamis/17 Oktober 2024
waktu : pukul 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Demikianlah ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,

Nofita Dwi Wahyuni



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5723 669

NOTULA

Dasar : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Oktober 2024
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Acara : Rapat Evaluasi Bulanan Oktober 2024
Peserta Rapat : 1. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
3. Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana dan PPNPN Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Jalannya Rapat :

Rapat Evaluasi Bulanan dimulai pada pukul 09.00 WIB di Aula Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Acara dibuka dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung, pembacaan doa dan mengumandangkan yel-yel.

Rapat Evaluasi Bulanan Oktober Tahun 2024 dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kembali melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait PERMA 7 Tahun 2016, PERMA 8 Tahun 2016, PERMA 9 Tahun 2016 dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menghimbau untuk mematuhi dan mempedomani peraturan-peraturan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mencoreng nama baik institusi. Selain itu diharapkan agar Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjalankan instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Palembang terkait disiplin absen manual dan finger print serta absensi online pada SIKEP. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 pada hari Jum'at batas pelaksanaan absensi kehadiran pukul 07.30 WIB dan absensi pulang dibuka pukul 16.30 WIB. Selain kedisiplinan, setiap aparat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga harus tetap berintegritas dalam melaksanakan tupoksi masing-masing.

Berdasarkan hasil pengawasan, Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana menyampaikan beberapa hal antara lain mengenai laporan terkait Restorative Justice yang belum dilaporkan kepada bagian Kepaniteraan Pidana terkait berhasil atau tidak berhasilnya pelaksanaan Restorative Justice, dan disarankan agar dapat dituliskan pada map perkara apakah pelaksanaan restorative justice tersebut berhasil atau tidak oleh Hakim atau Panitera Pengganti.

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memerintahkan agar dibuat cap stempel terkait penandaan dilaksanakan restorative justice atau tidak serta berhasil atau tidaknya restorative justice tersebut.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5723 669

Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata setelah melakukan pengawasan menemukan adanya temua sebagai berikut :

1. Petugas register perdata yang telah ditunjuk melalui SK KPN belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan diharapkan petugas yang ditunjuk agar dapat segera melaksanakan tugasnya;
2. Tanggal pemberitahuan upaya hukum mengalami keterlambatan dalam pengisian, sehingga diharapkan agar Jurusita dapat bekerjasama dengan bagian Kepaniteraan Perdata dalam penyampaian tanggal pemberitahuan upaya hukum;
3. Bundel B hilang karena update pada SIPP dan tidak dapat dilakukan pengisian karena sudah terkunci.

Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyampaikan perlunya perangkat tambahan bagi Jurusita. Namun menurut Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, perangkat yang tersedia sudah efektif untuk digunakan oleh 2 (dua) orang Jurusita, dimana saat ini terdapat 1 (satu) buah komputer yang digunakan dengan beban kerja Jurusita yang tidak terlalu tinggi.

Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum menyampaikan temuan bulan lalu yang sudah ditindaklanjuti, dimana komputer ruang arsip sudah diperbaiki dan ditambah memorinya serta bagian Hukum telah membuat laporan triwulan SKM dan SPK, yang keduanya telah diunggah ke website Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Namun terdapat beberapa temuan seperti lemari arsip perkara yang sudah penuh dan lemari besi ruang Hukum yang dialihfungsikan menjadi lemari arsip mengakibatkan arsip-arsip Kepaniteraan Hukum lainnya terletak di lantai dan terkesan tidak rapih sehingga dibutuhkan rak-rak untuk menata arsip tersebut. Box file arsip tersisa 5 (ima) buah, diminta kepada sub bagian Umum dan Keuangan agar dapat mengadakan box file yang dibutuhkan oleh bagian Hukum.

Hakim Pengawas Bidang menyampaikan bahwa pengisian SKP Triwulan III Tahun 2024 telah dilengkapi oleh seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan telah dinilai oleh atasan langsung masing-masing. Terkait nomenklatur jabatan PPNP yang diisi untuk pendaftaran seleksi PPPK Mahkamah Agung telah disesuaikan dengan ketentuan sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 34/SEK/PENG.KP1.1.7/X/2024. Kenaikan Gaji Berkala Hakim dan Pegawai yang berjumlah 7 (tujuh) orang sudah diusulkan dan akan dilakukan Rapat Baperjakat untuk 2 (dua) orang yang menyampaikan usul promosi.

Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan menyampaikan terkait penataan ruang laktasi telah ditindaklanjuti. Terkait temuan pada bulan lalu, terkait banyaknya abu rokok pada tangga ruang sidang candra sudah dibersihkan namun terkait APAR belum ditindaklanjuti. Selain itu, untuk TV di depan Ruang Candra telah dipasang namun belum terdapat aliran listrik sehingga monitor tersebut belum dapat dipergunakan.

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyampaikan bahwa anggaran perawatan AC split agar dapat segera digunakan untuk melakukan perawatan AC tersebut dan monitor TV di depan Ruang Candra agar dibuat vertikal untuk memuat jadwal sidang. Namun Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, menyampaikan bahwa monitor TV tersebut tidak dapat digunakan untuk menampilkan layar vertikal, sehingga diperlukan perangkat khusus.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5723 669

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, menyampaikan bahwa akan ada pengadaan PC berjumlah 2 (dua) buah dan Laptop 3 (tiga) buah, dimana salah satu PC akan dialihkan untuk menopang tugas pokok dan fungsi pada bagian Kepaniteraan Hukum.

Ibu Agewina, S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan menyampaikan agar CPU komputer yang berada di bawah meja sidang agar dirapikan posisinya, sehingga tidak tertendang oleh yang Hakim yang bersidang karena dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan pada CPU tersebut.

Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan menyampaikan bahwa tidak terdapat temuan pada bulan ini, namun terdapat beberapa catatan yang akan disampaikan antara lain :

1. Terkait SAKIP agar didiskusikan, karena berdasarkan informasi Pengadilan Tinggi Palembang pada saat dilakukan konsultasi terkait temuan SAKIP bahwa terdapat aplikasi khusus untuk menghitung capaian kinerja;
2. DIPA 01 yang belum terserap sudah dipindahkan ke pos anggaran lain;
3. Pemeliharaan AC outdoor agar segera dilaksanakan;
4. *Web hosting* sudah digunakan terhitung mulai hari ini;
5. Pada bagian PTIP terdapat 2 (dua) buah komputer server, dimana terdapat komputer server utama dan komputer cadangan, namun dalam hal spesifikasi server cadangan lebih mumpuni daripada server utama;
6. SIPP mengalami peningkatan/*upgrade* sehingga membutuhkan pengalihan dari komputer server utama ke komputer server cadangan atau dengan melakukan *upgrade* pada komputer server utama;
7. Pada bulan Desember akan dilakukan penentuan terkait *provider* mana yang akan digunakan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan menambahkan terkait provider di bulan November dapat segera dilakukan monitoring dan bisa segera diputuskan terkait provider mana yang akan digunakan. Performa server cadangan lebih bagus, namun untuk melakukan pemindahan *database* server utama ke cadangan diperlukan bantuan pihak ketiga. Terkait konsultasi SAKIP yang telah dilaksanakan, disampaikan bahwa untuk penghitungan nilai perkara terdapat aplikasi yang melaksanakan penghitungan nilai otomatis dari SIPP.

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menginstruksikan agar terkait aplikasi penghitungan nilai capaian kinerja ditanyakan kepada pemilik aplikasi terkait biaya pemasangan aplikasi tersebut. Anggaran terkait PC agar dikeluarkan untuk menambah performa PC server utama.

Pengawas bidang SIPP menyampaikan bahwa pada bulan September Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berada pada peringkat 5, terkait beberapa ketidaksesuaian sudah disampaikan pada satgas SIPP Pengadilan Tinggi Palembang dan akan disampaikan ke satgas Pusat. Sedangkan pada bulan Oktober, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berada peringkat 7, nilainya kecil dikarenakan terdapat beberapa ketidaksesuaian.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5723 669

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyampaikan kepada seluruh Panitera Pengganti agar berita acara perkara perdata dapat segera dikerjakan. Setelahnya, Panitera menyampaikan terkait tanda tangan elektronik yang masih mengalami gangguan hingga saat ini. Menurut staf sub bagian PTIP, M. Nouval Dwi Aditya menyatakan bahwa saat ini gangguan tersebut masih diinvestigasi oleh satgas pusat.

Hakim Pengawas PTSP menyampaikan bahwa mesin antrian telah diperbaiki, namun terdapat beberapa hal yang belum ditindaklanjuti seperti papan nama petugas supervisi yang belum ada, agar segerapa dipasang di PTSP. PTSP membutuhkan *flashdisk* untuk menerbitkan nama layanan dan tupoksi masing-masing bagian pada PTSP.

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyampaikan agar papan nama petugas supervisi segera dibuat dan dipasang, karena menjadi bagian dari kelengkapan PTSP. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga menyampaikan bahwa dalam penilaian AMPUH dan penilaian PTSP oleh Dirjen Badilum dipantau melalui CCTV sehingga mempengaruhi penilaian, diharapkan agar petugas PTSP tertib dalam melaksanakan pelayanan serta tidak meninggalkan tempat ketika jam pelayanan dimulai.

Nama Notulis,

Mutiara Saputri
NIP. 199603222019032007



Mengetahui,
Ketua
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,

Nofita Dwi Wahyuni
NIP. 197811252002122002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5723 669



Dok. Rapat Evaluasi Bulanan, 17 Oktober 2024



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5252 010

DAFTAR ABSEN HADIR
RAPAT EVALUASI BULAN OKTOBER TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

HARI/TANGGAL : KAMIS/17-10-2024
PUKUL : 09.00 WIB s.d. SELESAI
TEMPAT : AULA PROF. DR. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	Profita Dwi Waluyuni	Ketua		
2.	Fidri Agustine	Wkpr		
3.	Hani M	Hakim		
4.	Syanta Wana	Hakim		
5.	Agewina	Hakim		
6.	Asu Ahyani Siregar	Hakim		
7.	Wito	Panitia		
8.	Andrianto F.	sekretaris		
9.	Rahmat. J	Kasubag. Litum & Kell.		
10.	KEDIRU MUNSUAR	Pan Pio		
11.	Berry H.	Panmas P21.		
12.	A. HARUN Y	Panmas Hakim		
13.	Mathyas Adinata	PP		
14.	Yudi AS	PP		



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5252 010

15.	AL HISA ALAMSYAH	PP		
16.	Endang Azhami	Staf		
17.	Melly N	TS		
18.	PRAMUDI WIDODO	Staf		
19.	Mahmudah	Mag		
20.	M. Berto	/s		
21.	Rupen Haryanto	Staf		
22.	M. H. M. S. S. S.	OS		
23.	Riska Yanti	PPNPN		
24.	Faisal Rifai	PPNPN		
25.	M. Novri D.A.	PP NPN		
26.	Leneta Tataruni	PP		
27.	Wenny Puspita	PP		
28.	Hikmahwati	PP		
29.	Eunike Mayeni B	Staf		
30.	Dea Anggita	Staf		
31.	Muhara	Kepes otol		



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5252 010

32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				